



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 94);
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 99);
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021-2025.

Pasal I

Ketentuan BAB IV Lampiran Peraturan Bupati Sumedang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 56) disisipkan angka 4.2a dan Tabel 6.2 BAB VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Juni 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 7 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMEDANG NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021-2025

BAB IV

DESAIN ARSITEKTUR UMUM SPBE KABUPATEN SUMEDANG

4.2a. Referensi Arsitektur SPBE Kabupaten Sumedang

4.2a.1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

A. Pemahaman RAB

RAB digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian RAB ini harus mencakup seluruh aktivitas yang mungkin akan dilakukan. Mengingat bahwa SPBE diterapkan pada sebuah organisasi yang memiliki sifat legal formal yang tinggi (sebuah negara) maka RAB disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan akan selalu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada.

RAB ini disusun dengan cara menjabarkan fungsi bisnis dari fungsi-fungsi Perangkat Daerah berdasarkan standar penamaan bisnis yang umum dibandingkan dari sisi organisasi Perangkat Daerahnya.

RAB mengelompokan fungsi bisnis dari setiap Perangkat Daerah untuk menggambarkan potensi kolaborasi antar IPPD serta pengintegrasian secara terpadu di setiap elemen pemerintahan dalam melakukan fungsi-fungsi yang diemban. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan TIK pada IPPD dapat mendorong pencapaian tujuan pemerintah dalam menyediakan layanan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas administrasi pemerintahan secara efektif, efisien dan akuntabel serta mengurangi pemborosan anggaran belanja TIK yang diakibatkan karena adanya duplikasi pembelanjaan.

Dikarenakan RAB ini dikembangkan secara umum dan tidak terikat dengan organisasi yang ada, maka diharapkan dapat mengakomodasi setiap fungsi organisasi yang ada setiap IPPD, serta

para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan fungsi bisnis dari instansi pemerintah. Dengan tidak membedakan organisasi yang mengemban urusan pemerintahan tertentu, maka RAB SPBE dapat membantu memberikan analisa yang obyektif dalam penyederhanaan birokrasi yang menjadi prioritas agenda pembangunan.

B. Struktur RAB

Struktur dari RAB SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terdiri atas 4 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Sektor Pemerintahan, yang mengelompokkan fungsi pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai RAB tingkat 1 (pertama);
- 2) Urusan Pemerintahan, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai RAB tingkat 2 (kedua);
- 3) Fungsi Pemerintahan, yang diambil dari level 0 Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai RAB tingkat 3 (tiga); dan
- 4) Sub Fungsi Pemerintahan, yang diambil dari level 1 Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai RAB tingkat 4 (empat).

C. Taksonomi RAB

RAB SPBE Nasional terdiri dari 9 (sembilan) sektor pemerintahan di tingkat 1 (satu) dan 46 (empat puluh enam) urusan pemerintahan di tingkat 2 (dua) dan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ditambah fungsi pemerintahan di tingkat 3 (tiga) diambil dari level 0 Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan Sub Fungsi Pemerintahan di tingkat 4 yang diambil dari level 1 Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Tabel 4.2
Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Usaha	Urutan Proses Bisnis	RAB Level 1 Nasional (Dependency)	RAB Level 2 (Dependency)	RAB Level 3 (Dependency)	RAB Level 4 (Dependency)	Urutan Unit Kerja
SMD 01	Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinkes)	RAB 04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01 Kesehatan	RAB 04.01.04 Pelayanan Kesehatan	04.01.04.01 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
SMD 01	Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinkes)	RAB 04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01 Kesehatan	RAB 04.01.01 Pembinaan Kesehatan Regional	04.01.01.01 Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Dinkes
SMD 01	Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinkes)	RAB 04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01 Kesehatan	RAB 04.01.02 Farmasi dan alat Kesehatan	04.01.02.01 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinkes
SMD 01	Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinkes)	RAB 04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01 Kesehatan	RAB 04.01.03 Kesehatan Masyarakat	04.01.03.01 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
SMD 02	penyelenggaraan pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan (Disdik)	RAB 06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01 Pendidikan	RAB 06.01.07 Pengelolaan Pendidikan	06.01.07.01 Pengelolaan Pendidikan	Disdik
SMD 03	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial (Dinsos)	RAB 04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02 Sosial	RAB 04.02.07 Pemberdayaan Sosial	04.02.07.01 Pemberdayaan Sosial	Dinsos
SMD 03	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial (Dinsos)	RAB 04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02 Sosial	RAB 04.02.09 Rehabilitasi Sosial	04.02.09.01 Rehabilitasi Sosial	Dinsos
SMD 03	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial (Dinsos)	RAB 04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02 Sosial	RAB 04.02.08 Perlindungan Sosial	04.02.08.01 Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos
SMD 03	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)	RAB 03 Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01 Pekerjaan Umum	RAB 03.01.05 Pengelolaan Sumber Daya Air	03.01.05.01 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
SMD 03	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)	RAB 03 Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.04 Perumahan	RAB 03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan	03.04.05.01 Pengembangan Perumahan	DPUPR
SMD 04	Perempuan dan Anak	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang PPPA (DPPKB3A)	RAB 04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB 04.03.07 Perlindungan Perempuan	04.03.07.01 Peningkatan Perlindungan Perempuan	DPPKB3A
SMD 04	Perempuan dan Anak	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang PPPA (DPPKB3A)	RAB 04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB 04.03.08 Pemenuhan Hak Anak (PHA)	04.03.08.01 Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPPKB3A
SMD 04	Perempuan dan Anak	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang PPPA (DPPKB3A)	RAB 04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB 04.03.04 Perlindungan Anak	04.03.04.01 Perlindungan Khusus Anak	DPPKB3A
SMD 04	Pengarusutamaan Gender	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang PPPA (DPPKB3A)	RAB 04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB 04.03.03 Kesetaraan Gender	04.03.03.01 Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPPKB3A
SMD 04	Pemberdayaan Keluarga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang PPPA (DPPKB3A)	RAB 04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB 04.03.02 Pemberdayaan Perempuan	04.03.02.01 Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPKB3A
	Pemberdayaan Keluarga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang PPPA (DPPKB3A)	RAB 04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB 04.03.02 Pemberdayaan Perempuan	04.03.02.02 Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPKB3A
SMD 05	Kerukunan Beragama	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbangpol)	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.01 Dalam Negeri	RAB 09.01 .02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan umum	09.01.02.01 Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Bankesbangpol
SMD 05	Kerukunan Beragama	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbangpol)	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.01 Dalam Negeri	RAB 09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan umum	09.01.02.02 Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bankesbangpol
SMD 05	Kerukunan Beragama	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbangpol)	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.01 Dalam Negeri	RAB 09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan umum	09.01.02.03 Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bankesbangpol
SMD 05	Kerukunan Beragama	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbangpol)	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.01 Dalam Negeri	RAB 09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan umum	09.01.02.04 Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Bankesbangpol
SMD 05	Kerukunan Beragama	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbangpol)	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.01 Dalam Negeri	RAB 09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan umum	09.01.02.05 Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Bankesbangpol
SMD 05	Kerukunan Beragama	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (SATPOLPP)	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.02 Keamanan	RAB 05.02.01 Ketenteraman, Ketertiban Umum	05.02.01.01 Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	SATPOLPP
SMD 06	Pengembangan Kawasan Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perindustrian (DKPP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.01 Industri	RAB 02.01 .09 Pengelolaan Sistem Informasi Industri	02.01.09.01 Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	DKPP
SMD 06	Pengembangan Kawasan Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perindustrian (DKPP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.01 Industri	RAB 02.01.10 Perencanaan Pembangunan Industri	02.01.10.01 Perencanaan Dan Pembangunan Industri	DKPP

SMD 06	Pengembangan Kawasan Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perindustrian (DKPP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.01 Industri	RAB 02.01.11 Pengendalian Izin Usaha Industri	02.01.11.01 Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	DKPP
SMD 07	Pengembangan Agribisnis	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan perikanan (DPP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.06 Perikanan	RAB.02.06.06 Perikanan Budidaya	02.06.06.01 Pengelolaan Perikanan Budidaya	DPP
SMD 07	Pengembangan Agribisnis	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan perikanan (DPP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.06 Perikanan	RAB.02.06.03 Pengelolaan Hasil Perikanan	02.06.03.01 Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	DPP
SMD 07	Pengembangan Agribisnis	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian (DPKP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.03 Pertanian	RAB.02.03.08 Penanggulangan Bencana Pertanian	02.03.07.01 Peningkatan Penanggulangan Bencana Pertanian	DPKP
SMD 07	Pengembangan Agribisnis	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian (DPKP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.03 Pertanian	RAB.02.03.03 Penyediaan sarana dan prasarana pertanian	02.03.03.01 Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DPKP
SMD 07	Pengembangan Agribisnis	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian (DPKP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.03 Pertanian	RAB.02.03.03 Penyediaan sarana dan prasarana pertanian	02.03.03.01 Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DPKP
SMD 07	Pengembangan Agribisnis	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian (DPKP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.03 Pertanian	RAB.02.03.07 Penyuluhan Pertanian	02.03.07.01 Penyuluhan Pertanian	DPKP
SMD 07	Pengembangan Agribisnis	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian (DPKP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.03 Pertanian	RAB.02.03.09 Perizinan Usaha Peternakan	02.03.09.01 Perizinan Usaha Peternakan	DPKP
SMD 08	Pemajuan Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan (DISPARBUDPORA)	RAB 08 Budaya dan Agama	RAB 08.02 Kebudayaan	RAB 08.02.08 Pengelolaan Kebudayaan	08.02.08.01 Pengembangan Kebudayaan	DISPARBUDPORA
SMD 08	Pemajuan Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan (DISPARBUDPORA)	RAB 08 Budaya dan Agama	RAB 08.02 Kebudayaan	RAB 08.02.09 Pembinaan Kesenian	08.02.09.01 Pengembangan Kesenian Tradisional	DISPARBUDPORA
SMD 08	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan (DISPARBUDPORA)	RAB 08 Budaya dan Agama	RAB 08.02 Kebudayaan	RAB 08.02.01 Kesejarahan	08.02.01.01 Pembinaan Sejarah	DISPARBUDPORA
SMD 08	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan (DISPARBUDPORA)	RAB 08 Budaya dan Agama	RAB 08.02 Kebudayaan	RAB 08.02.02 Pelestarian Cagar Budaya	08.02.02.01 Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	DISPARBUDPORA
SMD 08	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan (DISPARBUDPORA)	RAB 08 Budaya dan Agama	RAB 08.02 Kebudayaan	RAB 08.02.10 Permuseum	08.02.10.01 Pengelolaan Permuseum	DISPARBUDPORA
SMD 08	Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata (DISPARBUDPORA)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.11 Pariwisata	RAB 02.11.02 Kepariwisataaan	02.11.02.01 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DISPARBUDPORA
SMD 08	Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata (DISPARBUDPORA)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.11 Pariwisata	RAB 02.11.02 Kepariwisataaan	02.11.02.02 Pemasaran Pariwisata	DISPARBUDPORA
SMD 09	Kualitas Infrastruktur	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR)	RAB 03 Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01 Pekerjaan Umum	RAB 03.01.07 Penyelenggaraan Jalan	03.01.07.01 Penyelenggaraan Jalan	DPUTR
SMD 09	Kualitas Infrastruktur	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPKPP)	RAB 03 Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01 Pekerjaan Umum	RAB 03.01.06 Pengelolaan Sistem Drainase	03.01.06.01 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPKPP
SMD 09	Kualitas Infrastruktur	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Transportasi (DISHUB)	RAB 03 Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03 Transportasi	RAB 03.03.04 Sarana Prasarana LLAJ	03.03.04.01 Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DISHUB
SMD 09	Kualitas Infrastruktur	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR)	RAB 03 Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01 Pekerjaan Umum	RAB 03.01.05 Pengelolaan Sumber Daya Air	03.01.05.02 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUTR
SMD 10	Ketahanan Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.02 Keamanan	RAB 05.02.05 Penanggulangan Bencana	05.02.05.01 Penanggulangan Bencana	BPBD
SMD 10	Ketahanan Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (SATPOLPP)	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.02 Keamanan	RAB 05.02.05 Penanggulangan Bencana	05.02.05.02 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOLPP
SMD 10	Ketahanan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial (Dinsos)	RAB 04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02 Sosial	RAB 04.02.06 Penanggulangan Pasca Bencana	04.02.06.04 Penanganan Bencana	DINSOS
SMD 11	Ketahanan Pangan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pangan (DPKP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	02.03.04.01 Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	DPKP
SMD 11	Ketahanan Pangan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pangan (DPKP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	02.03.04.02 Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DPKP
SMD 11	Ketahanan Pangan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pangan (DPKP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	02.03.04.03 Penanganan Kerawanan Pangan	DPKP
SMD 11	Ketahanan Pangan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pangan (DPKP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	02.03.04.04 Pengawasan Keamanan Pangan	DPKP
SMD 11	Ketahanan Pangan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perdagangan (DKPP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.02 Perdagangan	RAB.02.02.02 Pengelolaan Perdagangan	02.02.02.01 Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	DKPP

SMD 12	Kualitas Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup (DLHK)	RAB 07.05 Lingkungan dan Sumber Daya Alam		RAB 07.05.05 Perencanaan Lingkungan Hidup	07.05.01.01 Perencanaan Lingkungan Hidup	DLHK
SMD 12	Kualitas Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup (DLHK)	RAB 07.05 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05 Lingkungan Hidup	RAB 07.05.06 Pengelolaan Lingkungan Hidup	07.05.06.01 Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
SMD 12	Kualitas Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup (DLHK)	RAB 07.05 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05 Lingkungan Hidup	RAB 07.05.01 Sumberdaya Alam dan Ekosistem	07.05.01.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLHK
SMD 12	Kualitas Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup (DLHK)	RAB 07.05 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05 Lingkungan Hidup	RAB 07.05.06 Pengelolaan Lingkungan Hidup	07.05.06.02 Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	DLHK
SMD 12	Kualitas Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup (DLHK)	RAB 07.05 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05 Lingkungan Hidup	RAB 07.05.07 Pembinaan, Pemberdayaan Lingkungan Hidup	07.05.07.01 Pembinaan Dan Penguasaan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLHK
SMD 12	Kualitas Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup (DLHK)	RAB 07.05 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05 Lingkungan Hidup	RAB 07.05.07 Pembinaan, Pemberdayaan Lingkungan Hidup	07.05.07.02 Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLHK
SMD 12	Kualitas Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup (DLHK)	RAB 07.05 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05 Lingkungan Hidup	RAB 07.05.07 Pembinaan, Pemberdayaan Lingkungan Hidup	07.05.07.03 Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLHK
SMD 12	Kualitas Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup (DLHK)	RAB 07.05 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05 Lingkungan Hidup	RAB 07.05.07 Pembinaan, Pemberdayaan Lingkungan Hidup	07.05.07.04 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DLHK
SMD 12	Kualitas Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup (DLHK)	RAB 07.05 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05 Lingkungan Hidup	RAB 07.05.01 Sumberdaya Alam dan Ekosistem	07.05.01.02 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLHK
SMD 12	Kualitas Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPKPP)	RAB 03 Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01 Pekerjaan Umum	RAB 03.01.04 Pengelolaan air limbah domestik	03.01.04.01 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPKPP
SMD 13	Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal (DPMPTSP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.08 Investasi	RAB 02.08.05 Pengembangan Penanaman Modal	02.08.05.01 Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
SMD 13	Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal (DPMPTSP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.08 Investasi	RAB 02.08.05 Pengembangan Penanaman Modal	02.08.05.02 Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
SMD 14	Kompetensi Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja (DISNAKERTRANS)	RAB 06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02 Ketenagakerjaan	RAB 06.02.01 Pembinaan ketenagakerjaan regional	06.02.01.01 Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS
SMD 14	Kompetensi Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi (DISNAKERTRANS)	RAB 03 Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.02 Transmigrasi	RAB 03.02.04 Pengembangan Kawasan Transmigrasi	03.02.04.01 Pengembangan Kawasan Transmigrasi	DISNAKERTRANS
SMD 14	Produktivitas Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja (DISNAKERTRANS)	RAB 06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02 Ketenagakerjaan	RAB 06.02.04 Penyaluran Tenaga Kerja	06.02.04.01 Penempatan Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS
SMD 14	Produktivitas Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah (DKPP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.09 Koperasi	RAB 02.09.04 Pengawasan Koperasi	02.09.04.01 Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	DKPP
SMD 14	Produktivitas Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah (DKPP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.09 Koperasi	RAB 02.09.01 Pembinaan Koperasi	02.09.01.01 Pendidikan dan Latihan Perkerpasian	DKPP
SMD 14	Produktivitas Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah (DKPP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.09 Koperasi	RAB 02.09.03 Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi	02.09.03.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	DKPP
SMD 14	Produktivitas Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah (DKPP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.09 Koperasi	RAB 02.09.03 Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi	02.09.03.02 Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	DKPP
SMD 14	Produktivitas Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah (DKPP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.10 Usaha Kecil dan Menengah	RAB 02.10.04 Pemberdayaan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah	02.10.04.01 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	DKPP
SMD 14	Produktivitas Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah (DKPP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.10 Usaha Kecil dan Menengah	RAB 02.10.04 Pemberdayaan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah	02.10.04.02 Pengembangan UMKM	DKPP
SMD 14	Produktivitas Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata (DISPARBUDPORA)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.11 Pariwisata	RAB 02.11.05 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	02.11.05.01 Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	DISPARBUDPORA
SMD 14	Produktivitas Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata (DISPARBUDPORA)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.11 Pariwisata	RAB 02.11.05 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	02.11.05.02 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	DISPARBUDPORA
SMD 15	Kualitas Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian (BKPSDM)	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	09.06.01.01 Kepegawaian Daerah	BKPSDM
SMD 15	Kualitas Pelayanan Publik	Penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan	RAB 03 Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07 Kependudukan	RAB 03.07.05 Pelayanan Kependudukan dan	03.07.01.01 Pendaftaran Penduduk	DISDUKCAPIL
SMD 15	Kualitas Pelayanan Publik	Penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan	RAB 03 Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07 Kependudukan	RAB 03.07.05 Pelayanan Kependudukan dan	03.07.01.02 Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL

SMD 15	Kualitas Pelayanan Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal (DPMPTSP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.08 Investasi	RAB 02.08.02 Manajemen Penanaman Modal	02.08.02.01 Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
SMD 15	Kualitas Pelayanan Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal (DPMPTSP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.08 Investasi	RAB 02.08.02 Manajemen Penanaman Modal	02.08.02.02 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
SMD 15	Kualitas Pelayanan Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal (DPMPTSP)	RAB 02 Ekonomi dan Industri	RAB 02.08 Investasi	RAB 02.08.03 Manajemen Perizinan Penanaman Modal	02.08.03.01 Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
SMD 15	Kualitas Pelayanan Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.03 Informasi	RAB 09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik	09.03.05.01 Informasi Dan Komunikasi Publik	DISKOMINFOSANDITIK
SMD 17	Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan unsur kewilayahan (Kecamatan)	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 09.06.06 Manajemen Pelayanan Publik	09.06.06.01 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	KECAMATAN
SMD 17	Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.03 Informasi	RAB 09.03.02 Pengelolaan Informatika	09.03.02.01 Aplikasi Informatika	DISKOMINFOSANDITIK
SMD 17	Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Persandian (DiskominfoSanditik)	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.03 Informasi	RAB 09.03.08 Persandian	09.03.03.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk	DISKOMINFOSANDITIK
SMD 17	Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Statistik (DiskominfoSanditik)	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.03 Informasi	RAB 09.03.03 Pengelolaan Data Statistik	09.03.03.01 Penyelenggaraan Statistik Sektorial	DISKOMINFOSANDITIK
SMD 16	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perencanaan (BAPPPEDA)	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB 09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	09.05.01.01 Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPPEDA
SMD 16	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perencanaan (BAPPPEDA)	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB 09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	09.05.01.02 Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPPEDA
SMD 16	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Keuangan (Keuangan)	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.02 Keuangan	RAB 09.02.02 Keuangan Negara	09.02.02.01 Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
SMD 16	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Keuangan (BKAD)	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.02 Keuangan	RAB 09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	09.02.08.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD
SMD 16	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Keuangan (BAPPENDA)	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.02 Keuangan	RAB 09.02.09 Pengelolaan pajak	09.02.09.01 Pengelolaan Pendapatan Daerah	BAPPENDA
SMD 16	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengawasan (Insfektorat)	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 09.06.10 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	09.06.10.01 Penyelenggaraan Pengawasan	INSFEKTORAT
SMD 16	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengawasan (Insfektorat)	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 09.06.04 Pembinaan Reformasi Birokrasi	09.06.04.04 Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	INSFEKTORAT

4.2a.2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD)

A. Pemahaman RAD.

RAD merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Sub Bab RAB. Dengan adanya taksonomi dalam RAD yang selaras dengan RAB, maka memberikan kemudahan dalam menentukan metoda berbagi pakai data (*Data Share*) dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi atau redundansi data, sehingga dapat terwujud layanan pemerintah yang terintegrasi.

Hal ini perlu diperhatikan untuk memberikan data yang lebih akurat dan berkualitas dalam menghasilkan layanan pemerintah yang diperlukan, dimana hal ini juga menjadi tujuan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Interoperabilitas yang dimiliki oleh data dan informasi dalam SPBE memungkinkan adanya asas berbagi pakai data dan informasi secara lintas instansi, serta menjadi acuan dalam pengelolaan data dan informasi SPBE bagi IPPD. Data dan informasi yang laik dan dapat dipercaya, diperlukan dalam menghasilkan layanan SPBE yang baik.

RAD ini merupakan acuan dalam memetakan arsitektur data dalam penerapan SPBE.

Dengan meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi pemerintah ini, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan prioritas agenda pembangunan di semua lini, melalui pengambilan keputusan yang tepat sasaran (*Data-Driven Government*). Data yang valid, merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara.

B. Struktur RAD

Struktur dari RAD SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai RAD tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam data urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai RAD tingkat 2 (kedua).

Struktur dari RAD SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ditambah 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Data Topik, sebagai RAD tingkat 3 (tiga); dan
- 2) Data Sub Topik, sebagai RAD tingkat 4 (empat).

C. Taksonomi RAD

RAD SPBE Nasional terdiri dari 10 (sepuluh) data pokok di tingkat 1 (satu) dan 50 (lima puluh) data tematik di tingkat 2 (dua). Sementara untuk data Topik dan Sub Topik diambil dari sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang.

Tabel 4.3
Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD)

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	← Penghasil Data/Produsen Data	→ Penanggung Jawab Data/Wali Data (Dependency)	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ RAD Level 5 (Dependency)	← Standar Teknis dan Prosecur	← Audit Keamanan SPBE (Dependency)	← Identifikasi Kerentanan	← Kelainan Keamanan SPBE	← Edukasi Kesadaran	← Penanganan Insiden Keamanan SPBE (Dependency)	← Peningkatan Keamanan SPBE (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	
1	Export Di Kabupaten Sumedang	Nilai ekspor	-	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 perdagangan	RAD.02.02.04 ekspor impor	RAD.02.02.04.01 Export										Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Sumedang	Sarana Perdagangan	-	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 perdagangan	RAD.02.02.05 pemberdayaan konsumen	RAD.02.02.05.01 Sarana Perdagangan										Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	Sarana Perdagangan di Kabupaten Sumedang	Sarana Perdagangan	-	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 perdagangan	RAD.02.02.05 pemberdayaan konsumen	RAD.02.02.05.01 Sarana Perdagangan										Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
4	Jumlah Umkm di Kabupaten Sumedang	UMKM	-	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.10 usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.03 pengelolaan produksi dan pemasaran usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.03.01 Jumlah Umkm										Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
5	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang	Koperasi	-	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.09 koperasi	RAD.02.09.02 pengelolaan produksi dan pemasaran koperasi	RAD.02.09.02.02 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan										Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
6	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Sumedang	Koperasi		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.09 koperasi	RAD.02.09.02 pengelolaan produksi dan pemasaran koperasi	RAD.02.09.02.03 Jumlah Koperasi Menurut Jenis usaha (produksi, konsumsi, simpan pinjam dan serba usaha) per Kecamatan										Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

7	Jumlah Koperasi Unit Desa Tingkat Primer Menurut Kecamatan di Sumedang	Koperasi		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.09 koperasi	RAD.02.09 .02 pengelolaan produksi dan pemasaran koperasi	RAD.02.09.0 2.04 Jumlah Koperasi Unit Desa Tingkat Primer Menurut Kecamatan																	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
8	Jumlah Koperasi, KUD dan Non KUD Menurut Kecamatan di Sumedang	Koperasi		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.09 koperasi	RAD.02.09 .02 pengelolaan produksi dan pemasaran koperasi	RAD.02.09.0 2.04 Jumlah Koperasi Unit Desa Tingkat Primer Menurut Kecamatan																	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
9	Luas Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (hektar)	Perkebunan		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertanian	RAD.02.03 .02 peningkatan produksi pertanian	RAD.02.03.0 3.11 Luas Areal dan Produksi Perkebunan Besar Negara Menurut Jenis Tanaman																Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
10	Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (ha)	Sayuran		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertanian	RAD.02.03 .02 peningkatan produksi pertanian	RAD.02.03.0 2.01 Produksi Buah-buahan Dan Sayuran																Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
11	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (kuintal)	Sayuran		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertanian	RAD.02.03 .02 peningkatan produksi pertanian	RAD.02.03.0 2.01 Produksi Buah-buahan Dan Sayuran																Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
12	Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (ha)	Sayuran		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertanian	RAD.02.03 .02 peningkatan produksi pertanian	RAD.02.03.0 2.01 Produksi Buah-buahan Dan Sayuran																Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
13	Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (m2)	Biofarmaka		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.04 perkebunan	RAD.02.04 .05 pengembangan bio energi	RAD.02.04.0 5.01 Panen Tanaman Biofarmaka																Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

14	Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (kg)	Biofarm a		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.04 perkebunan	RAD.02.04 .05 pengembangan bio energi	RAD.02.04.0 5.01 Panen Tanaman Biofarmaka																			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15	Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (m2)	Biofarm a		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.04 perkebunan	RAD.02.04 .05 pengembangan bio energi	RAD.02.04.0 5.01 Panen Tanaman Biofarmaka																			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
16	Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (kg)	Biofarm a		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.04 perkebunan	RAD.02.04 .05 pengembangan bio energi	RAD.02.04.0 5.01 Panen Tanaman Biofarmaka																			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17	Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (m2)	Tanama n Hias		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertania n	RAD.02.03 .02 peningkatan produksi pertanian	RAD.02.03.0 3.27 Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman																			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18	Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (tangkai)	Tanama n Hias		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertania n	RAD.02.03 .02 peningkatan produksi pertanian	RAD.02.03.0 3.26 Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman																			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19	Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (m2)	Tanama n Hias		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertania n	RAD.02.03 .02 peningkatan produksi pertanian	RAD.02.03.0 3.26 Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman																			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20	Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (tangkai)	Tanama n Hias		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertania n	RAD.02.03 .02 peningkatan produksi pertanian	RAD.02.03.0 3.27 Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman																			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21	Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten	Buah - Buahhan		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertania n	RAD.02.03 .02 peningkatan produksi pertanian	RAD.02.03.0 2.01 Produksi Buah-buahan Dan Sayuran																		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

	Sumedang (km)						Persandian dan Statistik						Kewilayahan Umum	infrastruktur pekerjaan umum	Kondisi Jalan di Kabupaten Sumedang (km) (mantap, baik, sedang, rusak ringan, rusak berat)												
38	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Sumedang (km)	Jalan		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Pekerja an Umum	RAD.03.01 .02 pengelola an infrastruktur pekerjaan umum	RAD.03.01.0 3.08 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Sumedang (km)(baik, sedang, rusak ringan, rusak berat)								Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
39	Panjang Jalan dan Kondisi Berdasarkan Administrasi Pemerintah di Kabupaten Sumedang (km)	Jalan		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Pekerja an Umum	RAD.03.01 .02 pengelola an infrastruktur pekerjaan umum	RAD.03.01.0 3.05 Panjang Jalan dan Kondisi Berdasarkan Administrasi Pemerintah di Kabupaten Sumedang (km)									Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
40	Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan di Kabupaten Sumedang (km)	Jalan		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Pekerja an Umum	RAD.03.01 .02 pengelola an infrastruktur pekerjaan umum	RAD.03.01.0 3.04 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan di Kabupaten Sumedang (km) (aspal, beton, kerikil, tanah, tidak terinci)									Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
41	Jumlah Kantor transmigrasi berdasarkan kondisi Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang	Transmigrasi		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 Transmigrasi	RAD.03.02 .02 Bidang Transmigrasi	-										Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
42	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut	Transmigrasi		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 Transmigrasi	RAD.03.02 .03 Pendidikan dan Pelatihan Transmigrasi	RAD.03.02.0 3.02 Jumlah Transmigran lokal dilatih										Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	Status Pekerjaan Utama																								
43	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	Transmigrasi		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik		Ya			RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 Transmigrasi	RAD.03.02.03 Pendidikan dan Pelatihan Transmigrasi	RAD.03.02.03.02 Jumlah Transmigran lokal dilatih									Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
44	Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin	Transmigrasi		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik		Ya			RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 Transmigrasi	RAD.03.02.03 Pendidikan dan Pelatihan Transmigrasi	RAD.03.02.03.02 Jumlah Transmigran lokal dilatih									Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
45	Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin	Transmigrasi		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik		Ya			RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 Transmigrasi	RAD.03.02.03 Pendidikan dan Pelatihan Transmigrasi	RAD.03.02.03.02 Jumlah Transmigran lokal dilatih									Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
46	Lowongan Kerja yang Terdaftar Menurut Lapangan Usaha di Sumedang	Lowongan Kerja		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik		Ya			RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 Transmigrasi	RAD.03.02.03 Pendidikan dan Pelatihan Transmigrasi	RAD.03.02.03.02 Jumlah Transmigran lokal dilatih									Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
47	Lowongan Kerja yang Telah Terisi Menurut Lapangan Usaha di Sumedang	Lowongan Kerja		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik		Ya			RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 Transmigrasi	RAD.03.02.03 Pendidikan dan Pelatihan Transmigrasi	RAD.03.02.03.02 Jumlah Transmigran lokal dilatih									Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
48	Lowongan Kerja yang Belum Dipenuhi Menurut Lapangan Usaha di Jawa Barat	Lowongan Kerja		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik		Ya			RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 Transmigrasi	RAD.03.02.03 Pendidikan dan Pelatihan Transmigrasi	RAD.03.02.03.02 Jumlah Transmigran lokal dilatih									Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
49	Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Jawa Barat	Transmigrasi		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik		Ya			RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 Transmigrasi	RAD.03.02.03 Pendidikan dan Pelatihan Transmigrasi	RAD.03.02.03.02 Jumlah Transmigran lokal dilatih									Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

50	Jumlah Pencari Kerja Laki-laki Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Jawa Barat	Transmigrasi		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 Transmigrasi	RAD.03.02.03 Pendidikan dan Pelatihan Transmigran	RAD.03.02.03.02 Jumlah Transmigran lokal dilatih													Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
51	Jumlah Pencari Kerja Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Jawa Barat	Transmigrasi		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 Transmigrasi	RAD.03.02.03 Pendidikan dan Pelatihan Transmigran	RAD.03.02.03.02 Jumlah Transmigran lokal dilatih													Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
52	Jumlah Angkutan di Kabupaten Sumedang	Transportasi		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Perhubungan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 Transportasi	RAD.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	RAD.03.03.02.03 Jumlah moda angkutan umum (AKAP, AKDP, bus, angkutan kota, angkutan desa)												Dinas Perhubungan	
53	Data Trayek Angkutan di Sumedang	Transportasi		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Perhubungan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 Transportasi	RAD.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	RAD.03.03.02.01 Trayek Angkutan													Dinas Perhubungan
54	Jumlah Rambu di Kabupaten Sumedang	Transportasi		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Perhubungan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 Transportasi	RAD.03.03.03 Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan Transportasi	RAD.03.03.03.01 Jumlah Rambu													Dinas Perhubungan
55	Jumlah Total PJU Tiap Kecamatan Di Kabupaten Sumedang	Transportasi		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Perhubungan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 Transportasi	RAD.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	RAD.03.03.02.02 Total PJU													Dinas Perhubungan
56	Jumlah Rumah dan pemukiman Berdasarkan Kondisi di Kecamatan di Kabupaten Sumedang	Pemukiman		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.04 Perumahan	RAD.03.04.03 Pengembangan Kawasan Permukiman	RAD.03.04.03.01 Rumah dan pemukiman Berdasarkan Kondisi													Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
57	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Limbah		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Lingkungan hidup	RAD.07.05.02 Pelestarian lingkungan hidup	RAD.07.05.02.22 Pengolahan Air Limbah													Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

	Kecamatan di Kabupaten Sumedang														Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang									
66	Jumlah Rumah sakit Umum, Rumah sakit Khusus, Rumah Sakit/Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai Kesehatan, Posyandu dan Polindes Menurut Kecamatan	Kesehatan		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Kesehatan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Kesehatan	RAD.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	RAD.04.01.04.02 Rumah Sakit							Dinas Kesehatan
67	Jumlah Penyakit Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang	Kesehatan		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Kesehatan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Kesehatan	RAD.04.01.05 pencegahan dan pengendalian penyakit	RAD.04.01.05.02 Pengendalian Penyakit							Dinas Kesehatan
68	Jumlah Orang yang meninggal akibat Penyakit Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang	Kesehatan		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Kesehatan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Kesehatan	RAD.04.01.05 pencegahan dan pengendalian penyakit	RAD.04.01.05.01 Pencegahan Penyakit							Dinas Kesehatan
69	Jumlah Perawatan dan Pelayanan Ibu Hamil Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang	Kesehatan		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Kesehatan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Kesehatan	RAD.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	RAD.04.01.04.06 Perawatan dan Pelayanan Ibu Hamil							Dinas Kesehatan
70	Jumlah Perawatan dan Pelayanan Bayi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang	Kesehatan		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Kesehatan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Kesehatan	RAD.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	RAD.04.01.04.05 Perawatan dan Pelayanan Bayi							Dinas Kesehatan
71	Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kecamatan dan Jenis Penyakit	Kesehatan		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Kesehatan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik			Ya			RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Kesehatan	RAD.04.01.05 pencegahan dan pengendalian penyakit	RAD.04.01.05.01 Pencegahan Penyakit							Dinas Kesehatan
72	Pemberdayaan Perempuan dan Anak Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang	Pemberdayaan Perempuan		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Sosial/Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana P3A	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik						RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAD.04.03.02 Pemberdayaan Perempuan	-							Dinas Sosial/Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana P3A

81	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Pendidikan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik							RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Pendidikan	RAD.06.01 .03 pendidikan dasar	-						Dinas Pendidikan
82	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Pendidikan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik							RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Pendidikan	RAD.06.01 .04 pendidikan menengah	-						Dinas Pendidikan
83	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan	Pendidikan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Pendidikan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik							RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Pendidikan	RAD.06.01 .01 pembinaan pendidikan regional	-						Dinas Pendidikan
84	Jumlah Persampahan di Kabupaten Sumedang	Sampah	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik							RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Lingkungan Hidup	RAD.07.05 .02 Pelestarian Lingkungan Hidup	RAD.07.05.0 2.15 Persampahan						Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
85	Jumlah Pengolahan Sampah di Kabupaten Sumedang	Sampah	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik							RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Lingkungan Hidup	RAD.07.05 .02 Pelestarian Lingkungan Hidup	RAD.07.05.0 2.15 Pengolahan Sampah						Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
86	Jumlah Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang	Sampah	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik							RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Lingkungan Hidup	RAD.07.05 .02 Pelestarian Lingkungan Hidup	RAD.07.05.0 2.10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
87	Timbunan Sampah Menurut Kecamatan	Sampah	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik							RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Lingkungan Hidup	RAD.07.05 .02 Pelestarian Lingkungan Hidup	RAD.07.05.0 2.04 Timbunan Sampah						Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
88	Kendaraan Operasional Pengelolaan Sampah Menurut kecamatan di Sumedang	Pengelolaan Sampah	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik							RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Lingkungan Hidup	RAD.07.05 .02 Pelestarian Lingkungan Hidup	RAD.07.05.0 2.16 Kendaraan Operasional Pengelolaan Sampah						Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
89	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Sumedang	Iklim	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik							RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Lingkungan Hidup	RAD.07.05 .03 Manajemen Iklim dan Cuaca	-						Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

90	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama	Pendidikan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik								RAD.08 Budaya dan Agama	RAD.08.01 Agama	RAD.08.01.02 Pendidikan Agama	-										Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang
91	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama	Pendidikan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik								RAD.08 Budaya dan Agama	RAD.08.01 Agama	RAD.08.01.02 Pendidikan Agama	-										Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang
92	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama	Pendidikan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik								RAD.08 Budaya dan Agama	RAD.08.01 Agama	RAD.08.01.02 Pendidikan Agama	-										Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang
93	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama	Pendidikan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik								RAD.08 Budaya dan Agama	RAD.08.01 Agama	RAD.08.01.02 Pendidikan Agama	-										Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang
94	Jumlah Perpustakaan berdasarkan Jenis di Kabupaten Sumedang	Perpustakaan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik								RAD.08 Budaya dan Agama	RAD.08.02 Kebudayaan	RAD.08.02.04 Pembinaan Kepustakaan	RAD.08.02.04.03 Perpustakaan memenuhi standar										Dinas Arsip dan Perpustakaan
95	Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Jabatan dan Pendidikan	ASN	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik								RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	RAD.09.06.01.01 pembinaan kepegawaian instansi										Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
96	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang	ASN	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik								RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	RAD.09.06.02.05 Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Golongan dan Jenis Kelamin									Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
97	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang	ASN	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik								RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	RAD.09.06.02.02 Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin									Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

98	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang	ASN		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik					RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	RAD.09.06.02.01 Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
99	Jumlah Penerbitan SKHPN	SKHPN		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Narkotika Nasional	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik					RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Kesehatan	RAD.04.01.07 Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	RAD.04.01.07.01 Penyuluhan P4GN							Badan Narkotika Nasional
100	Jumlah Penyuluhan Talkshow Informasi dan Edukasi P4GN	P4GN		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Narkotika Nasional/Kesbangpol	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik					RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Kesehatan	RAD.04.01.07 Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	RAD.04.01.07.01 Penyuluhan P4GN							Badan Narkotika Nasional/Kesbangpol
101	Jumlah Kasus Narkoba yg ditangani BNN per Kecamatan	Narkoba		Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Narkotika Nasional	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik					RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Kesehatan	RAD.04.01.07 Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	RAD.04.01.07.03 Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang mengakses layanan pasca rehabilitasi							Badan Narkotika Nasional

4.2a.3. Referensi Arsitektur Layanan (RAL)

A. Pemahaman RAL

RAL adalah sistem pengklasifikasikan layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Sub Bab RAB. RAL yang didasari oleh seluruh fungsi-fungsi yang ada di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan layanan pemerintah yang ada, sehingga menjadi tematik layanan pemerintah terintegrasi. Dengan adanya pengelompokan yang tepat akan lebih mudah menghindari terjadinya duplikasi dan memberikan layanan pemerintah secara komprehensif.

Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Untuk itu RAL diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat. Dalam hal ini jika penerima manfaat tersebut adalah masyarakat seperti penerapan SPM dan dunia usaha seperti penerapan Cipta Kerja (eksternal dari pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan publik (*Government to Citizen/G2C* dan *Government to Business/G2B*) dan bila penerima manfaat tersebut adalah instansi pemerintah ataupun aparatur negara (internal pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai layanan administrasi pemerintahan (*Government to Government/ G2G*, *Government to Employee/G2E*).

Diharapkan dengan penerapan RAL SPBE dalam melakukan identifikasi layanan pemerintah, maka dapat mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah terintegrasi, serta mempercepat tersedianya infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar melalui pelayanan secara komprehensif, menjadikan pemerintah yang bersifat *user-centric* menuju penerapan *Society 5.0*.

B. Struktur RAL

Struktur dari RAL SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai RAL tingkat 1 (pertama); dan

- 2) Area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai RAL tingkat 2 (kedua).

Struktur dari RAL SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ditambah 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Kategori layanan, sebagai RAL tingkat 3 (tiga)
- 2) Sub Kategori layanan, sebagai RAL tingkat 4 (empat)

Selanjutnya IPPD akan mendefinisikan di tingkat bawahnya, yang akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE.

C. Taksonomi RAL

RAL terdiri dari 2 (dua) domain layanan di tingkat 1 (pertama) dan 40 (empat puluh) area layanan di tingkat 2 (kedua). Sementara domain layanan tingkat 3 (tiga) dan 4 (empat) merujuk pada Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Tabel 4.4
Referensi Arsitektur Layanan (RAL)

Property 55519	Method Name	Property 55520	Property 55521	Property 64596
ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan
	Promosi Kesehatan	Meningkatnya pengetahuan individu dan masyarakat tentang Pola Hidup bersih dan Sehat	Melaksanakan Pendidikan Kesehatan kepada masyarakat	1. Dinas Kesehatan , 2. Puskesmas, 3. Swasta
	Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya kesehatan lingkungan	Memberdayakan masyarakat mengoptimalkan potensi pada keluarga untuk upaya kesehatan lingkungan	1. Dinas Kesehatan , 2. Puskesmas, 3. Swasta
	1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Meningkatnya kesehatan kesehatan Ibu dan Anak	Memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat terkait kesehatan Ibu dan Anak	1. Dinas Kesehatan , 2. Puskesmas, 3. Swasta, 4 Rumah Sakit
	2. Pelayanan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Memberikan Pelayanan Gizi kepada masyarakat, dan melaporkan kepada Pimpinan	1. Dinas Kesehatan , 2. Puskesmas, 3. Swasta, 4 Rumah Sakit
	1. Pelayanan Immunisasi	Meningkatnya kekebalan buatan pada anak terhadap penyakit menular	Memberikan kekebalan buatan kepada anak	1. Puskesmas, 2. Ruah Sakit, 3. Swasta
	2. Pelayanan Epidemiologi	Memperoleh data dan informasi tentang penyebaran suatu penyakit/wabah	Menginventarisir data tentang penyebaran suatu penyakit/wabah, dan melaporkan kepada Pimpinan	1. Puskesmas, 2. Ruah Sakit, 3. Swasta
	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Memperoleh data dan informasi tentang penyakit tidak menular	Menginventarisir data dan informasi tentang penyakit tidak menular, dan melaporkan kepada Pimpinan	1. Puskesmas, 2. Ruah Sakit, 3. Swasta
	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Memperoleh data dan informasi tentang penyakit menular	Menginventarisir data dan informasi tentang penyakit menular, dan melaporkan kepada Pimpinan	1. Puskesmas, 2. Ruah Sakit, 3. Swasta
	Layanan Kesehatan Jiwa	Memperoleh data dan informasi tentang penyakit gangguan jiwa	Memberikan pelayanan kejiwaan kepada masarakat , menginventarisir data gangguan jiwa masyarakat, dan melaporkan kepada Pimpinan	1. Puskesmas, 2. Ruah Sakit, 3. Swasta
	Layanan pada Fasilitas Kesehatan Swasta dan Tradisional	memberikan alternatif upaya kesehatan kepada masyarakat	Memberikan legalitas pelayanan kesehatan swasta dan tradisional dalam sistem pelayanan kesehatan	
	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) / PSC 119	Mensyarat memperoleh layanan yang cepat dalam kasus gawat darurat kesehatan	Menyediakan pelayanan yang responsip kepada masyarakat dalam kegawat daruratan kesehatan	
	Layanan Gawat Darurat	Pasien mendapat pelayanan medis yang cepat	Memberikan Pelayanan gawat darurat medis kepada Pasien	Puskesmas dan Rumah Sakit
	Layanan Rawat Inap	Pasien mendapat ruang tempat perawatan yang layak	Memberikan Pelayanan rawat inap kepada Pasien	Puskesmas dan Rumah Sakit
	Layanan Rawat Jalan	Pasien mendapat fasilitas rawat jalan	Memberikan Pelayanan rawat jalan kepada Pasien	Puskesmas dan Rumah Sakit
	Layanan Laboratorium	Pasien mendapat laboratorium	Memberikan Pelayanan Laboratorium Pasien	Puskesmas dan Rumah Sakit
	Layanan Radiologi	Pasien mendapat fasilitas rawat jalan	Memberikan Pelayanan Radiologi Pasien	Puskesmas dan Rumah Sakit
	Layanan Farmasi	Pasien mendapat fasilitas rawat jalan	Memberikan Pelayanan kefarmasian kepada Pasien	Puskesmas dan Rumah Sakit
	Layanan Hemodialisa	Pasien gagal ginjal mendapat layanan Haemodialisa	Memberikan Pelayanan haemodialisa kepada Pasien gagal Ginjal	Puskesmas dan Rumah Sakit
	Layanan Nutrisi	Meningkatnya Status Gizi Individu	Memberikan Pelayanan Gizi kepada Pasien	1. Puskesmas, 2. Rumah Sakit
	Layanan Pemulasaraan Jenazah	Penghormatan terakhir	Memberikan layanan kemanusiaan yang beradab dan penghormatan terakhir kepada jenazah	1. Puskesmas, 2. Ruah Sakit, 3. Swasta
	Layanan Persalinan	Menurunya kematian Ibu dan dalam proses persalinan	Memberikan pelayanan persalinan kepada masyarakat dan melaporkan kepada Pimpinan	1. Puskesmas, 2. Ruah Sakit, 3. Swasta
	Layanan Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan	Pemeberian layanan rekomendasi pendirian satuan Pendidikan	rekomendasi legalitas izin rekomendasi pendirian Satuan Pendidikan di lingkungan Masyarakat	TK, PAUD, SD, SMP
	Layanan Legalisir Ijazah	Memberikan layanan untuk legalitas atas dokumen ijazah	keterangan Legalitas dokumen ijazah	SD, SMP
	Layanan Pengganti Ijazah	memberikan layanan berupa ijin penggantian dokumen ijazah yang hilang/rusak	pemberian izin penggantian dokumen ijazah yang rusak/hilang	SD, SMP
	Layanan Penerimaan Siswa Baru	Fasilitasi Wajib Belajar 9 Tahun bagi masyarakat	Memberikan fasilitas keikut sertaan masyarakat dalam upaya wajib belajar 9 tahun	TK, PAUD, SD, SMP
	Layanan Pengajuan Nomor Pokok Nasional (NPSN)	Pengesahan Sekolah dengan dasar hukum memiliki NPSN	Memberikan layanan kepada yayasan untuk mendapatkan NPSN	SD, SMP
	Layanan Magang/PKL/ Penelitian/ KKN	memfasilitasi siswa magang, PKL/KKN	Memberikan Layanan fasilitasi ijin untuk Magang, PKL, KKN bagi siswa	TK, PAUD, SD, SMP
	Layanan Rekomendasi Mutasi Siswa	Fasilitasi Mutasi siswa	Memberikan layanan kepada siswa siswi untuk mutasi sekolah	TK, PAUD, SD, SMP
	Layanan Pengesahan Kurikulum	Pengesahan Kurikulum	Memberikan layanan kurikulum sesuai dengan dasar hukum	BIDANG KURIKULUM TK, SD, SMP
	Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas	Untuk mewujudkan kemandirian penyandang Disabilitas Terlantar	Dinas Sosial
	Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar anak telantar di luar panti	Perlindungan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Terlantar	Pasilitasi Anak terlantar ke panti atau Balai	Dinas Sosial
	Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia telantar di luar panti	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar	Perlindungan dan memfasilitasi bantuan alat, sembako, Sandang untuk lanjut usia terlantar	Dinas Sosial
	Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Pemenuhan Kebutuhan Dasar tuna sosial khususny Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Fasilitasi Bantuan Sosial dan Kemandirian klien	Dinas Sosial
	Layanan Rumah Singgah	Memberikan tempat sementara selama maksimal 3 hari bagi orang terlantar yang masih proses pencarian pihak keluarganya	untuk Memberikan Perlindungan dan kebutuhan dasar selama proses pencarian keluarga klien	Dinas Sosial

Layanan Reunifikasi Orang Terlantar dengan Keluarganya	Mengembalikan orang terlantar ke Keluarga sesuai data kependudukan dari Disdukcapil dan Dinsos Diwilayahnya	fasilitasi bantuan reunifikasi keluarga	Dinas Sosial
Layanan Rekomendasi Pengumpulan Sumbangan Sosial Uang/Barang	legalitas Pengumpulan Sumbangan Sosial Uang/Barang	fasilitasi Layanan Rekomendasi Pengumpulan Sumbangan Sosial Uang/Barang	Dinas Sosial
Layanan di rumah besar simpati Sistem layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan program penanganan pakir miskin dan lanjut usia kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah	Memberikan informasi terkait propraam penanganan pakir miskin	Dinas Sosial
Layanan Rekomendasi Pengangkatan Anak/Pengasuhan Anak	Memfasilitasi proses pengangkatan anak/adopsi untuk kepentingan terbaik bagi anak	Terfasilitasinya proses adopsi bagi calon orangtua nagkat /COTA	Dinas Sosial
Layanan Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Orsos	Legalitas lembaga Kesos (LKS) dan Orsos	Facilitasi penerbitan ijin LKS dan Orsos	Dinas Sosial
Layanan Kepesertaan PBI JK APBD	Terpenuhi Kebutuhan Dasar Layanan Kesehatan	Kemudahan Akses Layanan Kesehatan	Dinas Sosial
Layanan SIPESAT	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Memudahkan petugas dan operator Kabupaten sampai ke Desa/ Kelurahan dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien sehingga masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan	Dinas Sosial
Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	Pemberian Bantuan Sembako, sandang dan alat rumah tangga	Dinas Sosial
Sistem Penyediaan Air Minum	Terpenuhnya air bersih dalam kebutuhan sehari-hari masyarakat.	menyediakan air bersih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.	Bidang Cipta Karya
Penyediaan Rumah Khusus Bagi Warga Terdampak Bencana	Ketersediaan rumah yang layak huni bagi korban bencana	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum
P2TP2A	menyediakan layanan bagi Masyarakat terutama Perempuan dan Anak untuk tindak Kekerasan	1. Pendampingan perempuan saat berhubungan dengan tindak kekerasan (pelaku/korban) 2. edukasi pencegahan tindak kekerasan pada perempuan	Bidang PPPA
Forum Anak, Satgas Kab Layak anak	Menyebarkan informasi dan melakukan upaya - upaya pemenuhan hak anak	1. Pelopor pemenuhan hak anak 2. pelapor ketidakpemenuhan hak anak	Bidang PPPA
PATBM, P2TP2A, PUSPA	1. PATBM sebagai Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat melakukan upaya - upaya pencegahan tindak kekerasan pada anak dan pendampingan anak saat terkena tindak kekerasan (pelaku/korban)/ pendampingan keluarga beresiko rawan anak bermasalah 2. P2TP2A sebagai pusat penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak 3.Puspa (Partisipasi Publik Untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak) sebagai forum penggerak pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. PATBM secara swadaya masyarakat edukasi upaya pencegahan kekerasan pada anak, pendampingan keluarga rawan anak bermasalah, pendampingan tindak kekerasan pada anak 2. P2TP2A pendampingan anak saat terjadi kekerasan (sebagai pelaku/korban), edukasi upaya pencegahan tindak kekerasan pada anak 3. PUSPA konseling kasus - kasus tindak kekerasan pada anak	Bidang PPPA
PUG, PUSPA, OPERATOR SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK (SIGA)	melaksanakan upaya - upaya penyetaraan gender di masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan sd evaluasi OPERATOR SIGA sebagai Upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data di kabupaten/kota melalui penyediaan fasilitas pengolah data dalam bentuk aplikasi kompilasi data Gender dan Anak	PUG pendampingan penyusunan perencanaan,implementasi program sd movev berbasis gender, Puspa sebagai forum penggerak pemberdayaan perempuan melakukan edukasi dan pendampingan program pemberdayaan perempuan OPERATOR SIGA mempunyai fungsi	bidang PPPA
PUSPAGA, PEKKA,Motekar	1. PEKKA Kelompok Perempuan yang mempunyai tanggungan ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan kepala keluarga, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan untuk menghambat anggota kelompok dari pinjaman-pinjaman bank keliling 2. Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) merupakan layanan yang dapat memberikan informasi edukasi konseling dan penjangkauan yang dilakukan oleh tenaga profesional secara gratis (salah satu program unggulan di Kabupaten Sumedang adalah Pesona Cinta Bersahaja sebagai pengembangan Sekoer Cinta) Perempuan dan Anak 3. Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga) merupakan agen yang dibentuk oleh Pemprov Jabar melalui DP3AKB untuk melakukan program pendampingan dan pemberdayaan keluarga	1. PEKKA memberikan sosialisasi,edukasi dan pendampingan program kepada perempuan kepala keluarga supaya berdaya dan bahagia 2. PUSPAGA memberikan layanan edukasi, pendampingan kepada kaum perempuan supaya berdaya melalui Sekoer cinta yang dikembangkan menjadi Pesona Cinta Bersahaja 3. MOTEKAR memberikan layanan motivasi kepada keluarga keluarga supaya berdaya dan menghimpun serta mendampingi persoalan - persoalan sosial ekonomi keluarga2 rawan	Bidang PPPA
Pemberdayaan Kelompok Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Kecil yang Berkualitas, Serta mengajak Keluarga Aktif bergerak dalam Ekonomi produktif	Memberikan Wawasan Kepada Masyarakat terkait dengan Pembinaan Keluarga, yang Mengedepankan Peran Serta Kepedulian Anggota Keluarga Guna Mencapai Kesejahteraan di dalam Keluarga	Bidang keluarga Sejahtera
Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian (SKP)	Memberikan Kemudahan pelayanan administrasi dalam informasi persyaratan dan pelayanan Pemberian Izin Penelitian	Memenuhi kebutuhan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat terkait izin penelitian	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Memberikan Kemudahan pelayanan administrasi dalam informasi persyaratan dan pelayanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas	Memenuhi kebutuhan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat terkait Ormas	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Surat Keterangan Pelaporan Ormas (SKPO)	Memberikan Kemudahan pelayanan administrasi dalam informasi persyaratan dan pelayanan Surat Keterangan Pelaporan Ormas (SKPO)	Memenuhi kebutuhan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat terkait Ormas	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Surat Pelaporan Pengurusan Partai Politik (SPPPP)	Memberikan Kemudahan pelayanan administrasi dalam informasi persyaratan dan pelayanan Surat Pelaporan Pengurusan Partai Politik (SPPPP)	Memenuhi kebutuhan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat terkait partai politik	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

	SIINas (Sistim Informasi Industri Nasional)	Mempercepat proses pelayanan Pada Sektor Industri	Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan Pada Sektor Industri	Bidang Perindustrian DKUKMPP
	Koordinasi dan Sinkronisasi	Mempercepat proses pembangunan industri dan kawasan industri	Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan jenis industri	Bidang Perindustrian DKUKMPP
	Pemberian Rekomendasi	Mempercepat proses legalitas usaha	Meningkatkan kelas industri	Bidang Perindustrian DKUKMPP
	Satgas Tanggap Bencana Alam Pertanian	untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana alam pertanian	mitigasi dampak bencana alam Pertanian	Bidans PSP
	Layanan Rekomendasi BBM Bersubsidi Alat dan Mesin Pertanian	untuk memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha bidang pertanian	Memfasilitasi pemberian BBM bersubsidi untuk alat dan mesin Pertanian ke SPBU	Bidang Tanaman Pangan
	Layanan pengurusan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Untuk memberikan perlindungan kepada Petani jika terjadi gagal panen akibat resiko banjir, kekeringan dan serangan OPT	Mengalihkan kerugian akibat resiko banjir,kekeringan dan serangan OPT melalui pertanggung jawaban asuransi	Bidang PSP
	Layanan Penyuluhan Pertanian	untuk meningkatkan kapasitas petani dan kelompok tani	memberikan penyuluhan kepada petani melalui pendekatan kelompok tani agar pengetahuan, keterampilan maupun sikap petani menjadi lebih baik dalam mengelola usahatani guna meningkatkan kesejahteraannya	Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Pelayanan Publik Terpadu DPKP (SKT)
	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan (SKKH)	Memeriksa setiap hewan yang akan di lalulintaskan ke daerah lain dengan keadaan sehat.	Menjaga agar setiap hewan yang dilalulintaskan aman dan tidak membawa penyakit ke daerah lain	Bidang Peternakan dan Masyarakat Veteriner
	Rekomendasi Importasi Produk Hewan	Memverifikasi terkait data pendukung untuk import Produk Hewan	Menjaga agar setiap produk asal hewan yang dilalulintaskan aman dan tidak membawa penyakit ke daerah lain	Bidang peternakan dan Masyarakat Veteriner
	Izin usaha rumah potong hewan dan unggas	Melayani masyarakat yang akan berusaha / membuka tempat rumah potong hewan dan unggas	Terciptanya keteraturan bagi setiap rumah potong hewan agar sesuai dengan peraturan dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya	Bidang peternakan dan Masyarakat Veteriner / UPTD Rumah Potong
	Penerbitan Rekomendasi berupa Surat Keterangan terdaftar (SKT) bagi kelompok ternak	Melayani masyarakat yang akan membuat/mendaftarkan kelompok ternak	Memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi dokumen dan lapangan	Bidang peternakan dan Masyarakat Veteriner
	Penerbitan Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner	Memberikan rekomendasi terkait ajuan pembuatan NKV dari pemohon sebagai bahan pertimbangan Sertifikat NKV yang dikeluarkan Provinsi	Sebagai bukti tertulis yang sah, telah dipenuhinya persyaratan hygiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan.	Bidang peternakan dan Masyarakat Veteriner
	Rekomendasi Izin revitalisasi dan adaptasi terhadap bangunan cagar budaya	Memberikan Kemudahan dalam informasi persyaratan dan pelayanan Pemberian Izin.	Merekommendasikan kebijakan yang kolaboratif berdasarkan kolaborasi dalam kelembagaan Kebudayaan.	Bidang Kebudayaan
	Rekomendasi Izin Inventarisasi terhadap bangunan struktur, dan kawasan yang diduga sebagai bangunan cagar budaya	Memberikan Kemudahan dalam informasi persyaratan dan pelayanan Pemberian Izin.	Merekommendasikan kebijakan yang kolaboratif berdasarkan kolaborasi dalam kelembagaan Kebudayaan.	Bidang Kebudayaan
	Izin membongkar sebagian atau melakukan Demolisi terhadap bangunan cagar budaya	Memberikan Kemudahan dalam informasi persyaratan dan pelayanan Pemberian Izin.	Merekommendasikan kebijakan yang kolaboratif berdasarkan kolaborasi dalam kelembagaan Kebudayaan.	Bidang Kebudayaan
	Rekomendasi Izin Pentas	Memberikan Kemudahan dalam informasi persyaratan dan pelayanan Pemberian Izin	Merekommendasikan kebijakan yang kolaboratif berdasarkan kolaborasi dalam kelembagaan Kebudayaan.	Bidang Kebudayaan
	Rekomendasi izin pemanfaatan bangunan cagar budaya	Memberikan Kemudahan dalam informasi persyaratan dan pelayanan Pemberian Izin	Merekommendasikan kebijakan yang kolaboratif berdasarkan kolaborasi dalam kelembagaan Kebudayaan.	Bidang Kebudayaan
	Izin membongkar atau melakukan Demolisi terhadap Bangunan cagar budaya	Memberikan Kemudahan dalam informasi persyaratan dan pelayanan Pemberian Izin	Merekommendasikan kebijakan yang kolaboratif berdasarkan kolaborasi dalam kelembagaan Kebudayaan.	Bidang Kebudayaan
	Rekomendasi Izin pemugaran bangunan pada lahan bangunan cagar budaya	Memberikan Kemudahan dalam informasi persyaratan dan pelayanan Pemberian Izin	Merekommendasikan kebijakan yang kolaboratif berdasarkan kolaborasi dalam kelembagaan Kebudayaan.	Bidang Kebudayaan
	Rekomendasi Izin Inventarisasi terhadap bangunan struktur, dan kawasan yang diduga sebagai bangunan cagar budaya	Memberikan Kemudahan dalam informasi persyaratan dan pelayanan Pemberian Izin	Merekommendasikan kebijakan yang kolaboratif berdasarkan kolaborasi dalam kelembagaan Kebudayaan.	Bidang Kebudayaan
	URCTL (Unit Reaksi Cepat Tambal Lubang)	Mempertahankan jalan kabupaten dalam kondisi mantap.	Menangani kerusakan ringan pada Ruas Jalan Kabupaten yang berlubang.	Bidang Bina Marga
	Pengujian Bahan Konstruksi	Memastikan bahan konstruksi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang telah ditetapkan.	Pengujian bahan konstruksi yang akan dan telah diterapkan di lapangan.	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	Sewa Alat Berat	Menyediakan alat berat untuk kelancaran kegiatan infrastruktur jalan.	Alat berat yang digunakan untuk membantu dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan.	UPTD Peralatan dan Perbengkelan
	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.	Seksi Kedaruratan dan Logistik
	Layanan Pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	untuk menjamin mutu dan Keamanan Pangan Segar	memberikan jaminan dan perlindungan masyarakat	Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ; Pelayanan Publik Terpadu (PSAT)

	Pemeriksaan/Penilaian dan rekomendasi Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL-UPL, SPPLH) dan Persetujuan Lingkungan Hidup	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap lingkungan hidup dari kegiatan dan /atau usaha yang dilaksanakan pelaku kegiatan dan / atau usaha	Salah satu persyaratan pemenuhan komitmen bagi pelaku kegiatan dan / atau usaha untuk memperoleh perizinan berusaha	Bidang Penataan dan Penataan Hukum Lingkungan
	Rekomendasi Persetujuan Teknis dan SLO Pembuangan Air Limbah dan Pengendalian Udara Emisi	Pengendalian pencemaran air dan udara	untuk Persyaratan Persetujuan Lingkungan untuk pembuangan air limbah dan pembuangan udara emisi sumber tidak bergerak	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Rekomendasi Rincian Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Penyimpanan sementara dan pengumpulan skala Kabupaten)	Pengendalian pencemaran akibat limbah bahan berbahaya dan beracun	Untuk Persyaratan Persetujuan Lingkungan untuk penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Persetujuan Lingkungan	Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh pelaku kegiatan dan / atau usaha sebagaimana tercantum di dalam dokumen lingkungan	Untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup	Bidang Penataan dan Penataan Hukum Lingkungan
	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup	Bidang Penataan dan Penataan Hukum Lingkungan
	Pelayanan Kemudahan akses Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	Para Pelaku Usaha Mudah Mendapatkan Informasi Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Sumedang	Memberikan Kemudahan Akses Informasi Penanaman Modal dan Perizinan Bagi Para Pelaku Usaha di Kabupaten Sumedang	DPMPPTSP
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Mengetahui Potensi Penanaman Modal yang ada di Kabupaten Sumedang	Mempromosikan Potensi Penanaman Modal yang ada di Kabupaten Sumedang	DPMPPTSP
	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatkan kompetensi pencari kerja	Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; UPTD BLK
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Agar LPK Swasta menjadi kompeten serta terakreditasi	Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
	Penempatan Transmigrasi	Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penempatan calon transmigran sesuai dengan quota yang telah ditentukan oleh pemerintah	Bidang Transmigrasi
	Pelatihan calon transmigran	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Terlatihnya calon transmigran yang akan di tempatkan di lokasi transmigrasi	Bidang Transmigrasi
	Layanan penempatan tenaga kerja	Memberikan Pelayanan antar Kerja; Memberikan Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja; Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan; Memperluas kesempatan kerja	Memperkenalkan Tenaga Kerja dengan Pemberi Kerja; Memberikan informasi mengenai jabatan dan pekerjaan kepada pencari kerja; Memfasilitasi calon tenaga kerja disabilitas untuk mendapatkan keahlian (pekerjaan) baik di perusahaan maupun wirausaha; Melatih Tenaga Kerja Mandiri untuk dapat mengembangkan usahanya; Melatih pra purna kerja dan purna kerja untuk dapat berwirausaha	Bidang Penempatan dan Perluasan Ketenagakerjaan
	Layanan penempatan tenaga kerja	Memberikan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Memberikan informasi pasar kerja secara online baik dalam negeri maupun Luar Negeri	Bidang Penempatan dan Perluasan Ketenagakerjaan
	Layanan penempatan tenaga kerja	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Melakukan pengendalian dokumen TKA kepada perusahaan pengguna TKA	Bidang Penempatan dan Perluasan Ketenagakerjaan
	Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumedang	Pemeriksaan kesehatan Simpan Pinjam	Bidang Koperasi
	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Memperbaiki tingkat efektivitas kegiatan koperasi dalam mencapai hasil usaha yang telah ditetapkan	Untuk mempersiapkan SDM koperasi dengan memperbaiki kinerja lewat peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan SDM Koperasi	Bidang Koperasi
	Pertumbuhan iklim usaha, pembiayaan dan pengembangan usaha	Memperkuat usaha koperasi sehingga tangguh, mandiri, serta dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya	Memfasilitasi usaha koperasi, peningkatan usaha SDM koperasi, serta pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi	Bidang Koperasi
	Surat Keterangan	untuk memperluas pemasaran produk, memperluas jaringan usaha	Memfasilitasi pelaku usaha dalam mengembangkan usaha	Bidang UMKM
	Pelatihan UMKM, Bimtek, Fasilitas Sarana Prasarana Produksi, dan permodalan	Untuk mengembangkan UMKM	Meningkatkan SDM, Produktivitas, dan kualitas produk	Bidang UMKM
	Pensiun Pegawai	Terprosesnya pensiun Pegawai	Memproses pensiun pegawai	BKPSDM

Perpindahan Pegawai (Mutasi)	Terprosesnya Perpindahan Pegawai	Memproses perpindahan Pegawai antar Instansi dan antar Kabupaten/Kota serta antar Provinsi	BKPSDM
Kenaikan Pangkat	Terprosesnya Kenaikan Pangkat Pegawai	Memproses kenaikan pangkat Pegawai	BKPSDM
Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional	Terselesainya pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional	Memfasilitasi seleksi, pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional	BKPSDM
Ijin Perceraian	memberikan pelayanan kepada ASN yang mengajukan proses perceraian	Memfasilitasi mediasi, mengupayakan agar rujuk kembali	BKPSDM
Cuti Besar	Penyelesaian Cuti Besar	memberikan pelayanan kepada ASN yang mengajukan Cuti Besar	BKPSDM
Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	Penyelesaian Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	memberikan pelayanan kepada ASN yang mengajukan Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	BKPSDM
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	Masyarakat Mendapatkan Layanan Perizinan dan Nonperizinan	Memberikan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Masyarakat	DPMPTSP
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha Melakukan Pelaporan LKPM	Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersedianya Data sebagai Bahan Pengambilan Keputusan	Mengolah Data dan Informasi	DPMPTSP
Pengelolaan Media Sosial DiskominfoSanditik	Mewujudkan akses pemerataan komunikasi publik	Penyebarluasan informasi program-program Pemerintah dan Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Pengelolaan web sumedangkab.go.id	Mewujudkan akses pemerataan komunikasi publik	Penyebarluasan informasi program-program Pemerintah dan Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Pengelolaan Youtube DiskominfoSanditik	Mewujudkan akses pemerataan komunikasi publik	Penyebarluasan informasi program-program Pemerintah dan Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Pemberdayaan KIM Kecamatan dan Desa	Mewujudkan akses pemerataan komunikasi publik	Penyebarluasan informasi program-program Pemerintah dan Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Kerjasama dengan Media Massa	Mewujudkan akses pemerataan komunikasi publik	Penyebarluasan informasi program-program Pemerintah dan Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Layanan Rekomendasi Menara Telekomunikasi, Layanan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Memberikan Rekomendasi Pendirian Menara Baru, memberikan pengawasan pada Menara yang sudah berdiri	Pengecekan awal untuk memastikan kelayakan pendirian Menara, Monitoring kelengkapan Menara yang sudah berdiri agar tidak terjadi pengaduan Masyarakat	DiskominfoSanditik
Pengelolaan Permohonan Informasi	Menyediakan Dokumen/Informasi yang dibutuhkan oleh Masyarakat	Pengelola dan Penyampai Dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik	Bidang IKP
Pelayanan pengaduan publik	Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengawasan program dan kinerja Pemerintah	Menyampaikan aduan Masyarakat kepada Instansi terkait	Bidang IKP
Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik	Mengasistinsi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik bagi Pegawai Birokrasi dan Aparatur Desa	Mempercepat dan mempermudah Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik	Bidang Keamanan Informasi dan Persandian
Layanan Open Data Sumedang	Pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang	Memberikan Data, Informasi dan Pengetahuan kepada Masyarakat dan Pimpinan sebagai Dasar Pembangunan Daerah	Bidang Statistik
Layanan administrasi yang berkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Merumuskan dan menyusun isu strategis dan kebijakan pemerintah terkait dengan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	Merekomendasikan kebijakan yang kolaboratif dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Bidang PPEP
Layanan administrasi yang berkaitan dengan hasil penelitian/kajian dan inovasi	Menyediakan hasil penelitian/kajian dan inovasi sebagai bahan perumusan dan penyusunan isu strategis dan kebijakan pemerintah terkait dengan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	Merekomendasikan kebijakan yang kolaboratif dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Bidang PPEP
Layanan administrasi yang berkaitan dengan proses penyusunan dokumen hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan	Merumuskan dan menyusun kebijakan pembangunan dan pengembangan daerah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ketercapaian target pembangunan	Merekomendasikan kebijakan yang kolaboratif dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Bidang PPEP
Verifikasi DPA	Melayani SKPD untuk proses verifikasi DPA	Memverifikasi DPA yang diajukan SKPD	Bidang Anggaran

	Asistensi RKA	Melayani SKPD untuk proses Asistensi RKA	Asistensi RKA yang diajukan SKPD	Bidang Anggaran
	Penerbitan SP2D	Melayani Penerbitan SP2D	Memproses SPM SKPD untuk menerbitkan SP2D	Bidang Perbendaharaan
	Pengesahan SKPP	Melayani pengesahan SKPP dari SKPD	Menerbitkan SKPP	Bidang Perbendaharaan
	Mutasi data Gaji	Melayani mutasi Gaji dari SKPD	memproses mutasi gaji	Bidang Perbendaharaan
	Persetujuan TUP	Melayani persetujuan TUP dari SKPD	Persetujuan TUP	Bidang Perbendaharaan
	Penerbitan Rekomendasi Pembayaran Gaji Mutasi	Melayani penerbitan rekomendasi pembayaran Gaji Mutasi	Penerbitan Rekomendasi Pembayaran Gaji Mutasi	Bidang Perbendaharaan
	Verifikasi Dokumen Pencairan Banprov	Melayani verifikasi pencairan Banprov	Verifikasi Dokumen Pencairan Banprov	Bidang Perbendaharaan
	Fasillitasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Melayani fasillitas Penyaluran DAK Fisik dari SKPD	Fasillitasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Bidang Perbendaharaan
	Fasilitas Pencairan Dana Desa	Melayani pencairan dana Desa	Fasilitas Pencairan Dana Desa	Bidang Perbendaharaan
	Rekonsiliasi Laporan Keuangan, LRA dan LO	Melayani rekonsiliasi Laporan Keuangan, LRA dan LO dari SKPD	Rekonsiliasi Laporan Keuangan, LRA dan LO	Bidang Akuntansi
	Rekonsiliasi Asset Tetap	Melayani rekonsiliasi Aset Tetap dari SKPD	Rekonsiliasi Asset Tetap	Bidang Aset
	Surat Keterangan tidak membawa aset daerah	Melayani pembuatan Surat Keterangan tidak membawa aset daerah	Surat Keterangan tidak membawa aset daerah	Bidang Aset
	Surat Keterangan pengantar untuk membayar pajak kendaraan	Melayani pembuatan Surat keterangan pengantar untuk membayar pajak kendaraan dinas	Surat Keterangan pengantar untuk membayar pajak kendaraan	Bidang Aset

Property 64585	ConnectedComponent 54	ConnectedComponent 54	ConnectedComponent 54	ConnectedComponent 54	ConnectedComponent 54
Kementerian Lembaga Terkait	Proses Bisnis (Dependency)	RAL Level (Dependency)	RAL Level (Dependency)	RAL Level (Dependency)	RAL Level (Dependency)
Kemkes	Kesehatan Masyarakat	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.25 Kesehatan	RAL 01.25.01 Upaya Kesehatan Masyarakat	RAL 01.25.01.01 Promosi Kesehatan
1. Kemkes, 2. Kementrian LH	Kesehatan Masyarakat	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.25 Kesehatan	RAL 01.25.01 Upaya Kesehatan Masyarakat	RAL 01.25.01.02 Kesehatan Lingkungan
1. Kemkes, 2. Kementrian Pemberdayaan Perempuan	Kesehatan Masyarakat	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.25 Kesehatan	RAL 01.25.01 Upaya Kesehatan Masyarakat	RAL 01.25.01.03 Kesehatan Keluarga dan Gizi
1. Kemkes, 2. Kemindag, 3. Kemtan,	Kesehatan Masyarakat	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.25 Kesehatan	RAL 01.25.01 Upaya Kesehatan Masyarakat	RAL 01.25.01.03 Kesehatan Keluarga dan Gizi
1. Kemkes, 2. Kemdiknas, 3. Kemenag, 4. Kemendagri	Kesehatan Masyarakat	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.25 Kesehatan	RAL 01.25.01 Upaya Kesehatan Masyarakat	RAL 01.25.01.04 Layanan Surveilans Epidemiologi
1. Kemkes, 2. Kemdiknas, 3. BPBN, 4. Kemendagri	Kesehatan Masyarakat	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.25 Kesehatan	RAL 01.25.01 Upaya Kesehatan Masyarakat	RAL 01.25.01.04 Layanan Surveilans Epidemiologi
Kemkes	Kesehatan Masyarakat	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.25 Kesehatan	RAL 01.25.01 Upaya Kesehatan Masyarakat	RAL 01.25.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Kemkes	Kesehatan Masyarakat	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.25 Kesehatan	RAL 01.25.01 Upaya Kesehatan Masyarakat	RAL 01.25.01.06 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Kemkes	Kesehatan Masyarakat	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.25 Kesehatan	RAL 01.25.01 Upaya Kesehatan Masyarakat	RAL 01.25.01.07 Kesehatan Jiwa
	Kesehatan Masyarakat	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	RAL 01.25.02.01 Fasilitas Kesehatan Swasta dan Tradisional
	Kesehatan Masyarakat	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	RAL 01.25.02.02 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Kemkes	Kesehatan Masyarakat	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.25 Kesehatan	RAL 01.25.03 Layanan Kesehatan Rujukan	RAL 01.25.03.01 Gawat Darurat
Kemkes	Kesehatan Masyarakat	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.25 Kesehatan	RAL 01.25.03 Layanan Kesehatan Rujukan	RAL 01.25.03.02 Rawat Inap
Kemkes	Kesehatan Masyarakat	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.25 Kesehatan	RAL 01.25.03 Layanan Kesehatan Rujukan	RAL 01.25.03.03 Rawat Jalan
Kemkes	Kesehatan Masyarakat	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.25 Kesehatan	RAL 01.25.03 Layanan Kesehatan Rujukan	RAL 01.25.03.04 Laboratorium
Kemkes	Kesehatan Masyarakat	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.25 Kesehatan	RAL 01.25.03 Layanan Kesehatan Rujukan	RAL 01.25.03.05 Radiologi
Kemkes	Kesehatan Masyarakat	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.25 Kesehatan	RAL 01.25.03 Layanan Kesehatan Rujukan	RAL 01.25.03.06 Farmasi
Kemkes	Kesehatan Masyarakat	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.25 Kesehatan	RAL 01.25.03 Layanan Kesehatan Rujukan	RAL 01.25.03.07 Hemodialisa
Kemkes	Kesehatan Masyarakat	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.25 Kesehatan	RAL 01.25.03 Layanan Kesehatan Rujukan	RAL 01.25.03.08 Nutrisi
Kemkes	Kesehatan Masyarakat	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.25 Kesehatan	RAL 01.25.03 Layanan Kesehatan Rujukan	RAL 01.25.03.09 JENAZAH
1. Kemkes, 2. Kemdiknas, 3. Kemenag, 4. Kemendagri	Kesehatan Masyarakat	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.25 Kesehatan	RAL 01.25.03 Layanan Kesehatan Rujukan	RAL 01.25.03.10 Persalinan
KEMENDIKBUD	Penyelenggaraan Pendidikan	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01.31.01.01 Layanan Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan
KEMENDIKBUD	Penyelenggaraan Pendidikan	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01.31.01.02
KEMENDIKBUD	Penyelenggaraan Pendidikan	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01.31.01.03 Layanan Legalisir Ijazah
KEMENDIKBUD	Penyelenggaraan Pendidikan	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01.31.01.04 Layanan Penerimaan Siswa Baru
KEMENDIKBUD	Penyelenggaraan Pendidikan	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01.31.01.05 Layanan Pengajuan Nomor Pokok Nasional (SPSN)
KEMENDIKBUD	Penyelenggaraan Pendidikan	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01.31.01.06 Layanan Magang/PKL/Penelitian/KKN
DISDIK	Penyelenggaraan Pendidikan	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01.31.01.08 Layanan Rekomendasi Mutasi Siswa
KEMENDIKBUD	Penyelenggaraan Pendidikan	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01.31.01.09 Layanan Pengesahan Kurikulum
Kemensos RI	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Rehabilitasi Sosial	RAL 01.26.01.01 Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
Kemensos RI	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Rehabilitasi Sosial	RAL 01.26.01.02 Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar anak telantar di luar panti
Kemensos RI	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Rehabilitasi Sosial	RAL 01.26.01.03 Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia telantar di luar panti
Kemensos RI	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Rehabilitasi Sosial	RAL 01.26.01.04 Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
Kemensos RI	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	RAL 01 LAYANAN PUBLIK	RAL 01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Rehabilitasi Sosial	RAL 01.26.01.05 Layanan Rumah Singgah

Kemensos RI	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 Sosial	RAL.01.26.01 Rehabilitasi Sosial	RAL.01.26.01.06 Layanan Reunifikasi Orang Terlantar dengan Keluarganya
Kemensos RI	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 Sosial	RAL.01.26.02 Rekomendasi Pengumpulan Sumbangan	RAL.01.26.02.01 Layanan Rekomendasi Pengumpulan Sumbangan Sosial Uang/Barang
Kemensos RI	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 Sosial	RAL.01.26.02 Rekomendasi Pengumpulan Sumbangan	RAL.01.26.02.02 Layanan di rumah besar simpati Sistem layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
Kemensos RI	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 Sosial	RAL.01.26.03 Pengangkatan Anak/Adopsi	RAL.01.26.03.01 Layanan Rekomendasi Pengangkatan Anak/Pengasuhan Anak
Kemensos RI	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 Sosial	RAL.01.26.04 Rekomendasi Izin Operasional Organisasi Sosial	RAL.01.26.04.01 Layanan Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Orsos
Kemensos RI	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 Sosial	RAL.01.26.05 Kepesertaan BPJS	RAL.01.26.05.01 Layanan Kepesertaan PBI JK APBD
Kemensos RI	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 Sosial	RAL.01.26.06 Penanggulangan PPKS	RAL.01.26.06.01 Layanan SIPESAT
Kemensos RI	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 Sosial	RAL.01.26.07 Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAL.01.26.07.01 Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota
	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL.01.17.01 Sistem Penyediaan Air Minum	RAL.01.17.01.04 Layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Direktorat Rumah Khusus)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 Perumahan	RAL.01.20.01 Penanganan Hunian Pasca Bencana	RAL.01.20.01.01 Layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
Kementerian perempuan dan anak	Perempuan dan Anak	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAB.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL.01.27.01 Perlindungan Perempuan	RAL.01.27.01.01 Peningkatan Perlindungan Perempuan
Kementerian Peemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perempuan dan Anak	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAB.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL.01.27.02 Pemenuhan Hak Anak	RAL.01.27.02.01 Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Kementerian Peemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perempuan dan Anak	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAB.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL.01.27.03 Perlindungan Anak	RAL.01.27.03.01 Perlindungan Khusus Anak
Kementerian Peemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perempuan dan Anak	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAB.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL.01.27.04 Pengarusutamaan gender	RAL.01.27.04.01 Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Kementerian Peemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perempuan dan Anak	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAB.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL.01.27.05 Kualitas Keluarga	RAL.01.27.05.01 Peningkatan Kualitas Keluarga
BKKBN	Perempuan dan Anak	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAB.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL.01.27.06 Keluarga Sejahtera	RAL.01.27.06.01 Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Kementerian Dalam Negeri	Kerukunan Beragama	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 Agama	RAL.01.42.01 Kebijakan di bidang administrasi perizinan penelitian	RAL.01.42.01.01 Layanan Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian (SKP)
Kementerian Dalam Negeri	Kerukunan Beragama	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 Agama	RAL.01.42.02 Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	RAL.01.42.02.01 Layanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
Kementerian Dalam Negeri	Kerukunan Beragama	RAL.01 LAYANAN PUBLIK			RAL.01.42.02.02 Layanan Surat Keterangan Pelaporan Ormas (SKPO)
Kementerian Dalam Negeri	Kerukunan Beragama	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 Agama	RAL.01.42.03 Pemberdayaan dan Pengawasan Parpol	RAL.01.42.03.01 Layanan Surat Pelaporan Pengurusan Partai Politik (SPPPP)

Kementerian Perindustrian	Pengembangan Kawasan Industri	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 Industri	RAL.01.05.01 Pengelolaan Sistem Informasi Industri	RAL.01.05.01.01 Layanan Informasi Industri Nasional
Kementerian Perindustrian	Pengembangan Kawasan Industri	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 Industri	RAL.01.05.02 Perencanaan Pembangunan Industri	RAL.01.05.02.01 Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Kementerian Perindustrian	Pengembangan Kawasan Industri	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 Industri	RAL.01.05.03 Pengendalian Izin Usaha Industri	RAL.01.05.03.01 Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Kementerian Pertanian	Pengembangan Agribisnis	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 Pertanian	RAL.01.07.01 Penanggulangan Bencana Pertanian	RAL.01.07.01.01 Peningkatan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Kementerian Pertanian	Pengembangan Agribisnis	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 Pertanian	RAL.01.07.02 Pengembangan Sarana Pertanian	RAL.01.07.02.01 Layanan Rekomendasi BBM Bersubsidi Alat dan Mesin Pertanian
Kementerian Pertanian	Pengembangan Agribisnis	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 Pertanian	RAL.01.07.03 Pengembangan Prasarana Pertanian	RAL.01.07.03.01 Layanan pengusulan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
Kementerian Pertanian	Pengembangan Agribisnis	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 Pertanian	RAL.01.07.04 Penyuluhan Pertanian	RAL.01.07.04.01 Layanan Penyuluhan Pertanian
Kementerian Pertanian	Pengembangan Agribisnis	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 Peternakan	RAL.01.09.01 Perizinan Usaha Peternakan	RAL.01.09.01.01 Layanan rekomendasi izin pemasukan dan pengeluaran hewan (SKKH)
Kementerian Pertanian	Pengembangan Agribisnis	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 Peternakan	RAL.01.09.01 Perizinan Usaha Peternakan	RAL.01.09.01.02 Layanan rekomendasi izin Importasi Produk Hewan
Kementerian Pertanian	Pengembangan Agribisnis	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 Peternakan	RAL.01.09.01 Perizinan Usaha Peternakan	RAL.01.09.01.03 Layanan Izin usaha rumah potong hewan dan unggas
Kementerian Pertanian	Pengembangan Agribisnis	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 Peternakan	RAL.01.09.01 Perizinan Usaha Peternakan	RAL.01.09.01.04 Layanan Rekomendasi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi kelompok ternak
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	Pengembangan Agribisnis	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 Peternakan	RAL.01.09.01 Perizinan Usaha Peternakan	RAL.01.09.01.05 Layanan Rekomendasi Penerbitan Nomor Kontrol Veteriner
	Pemajuan Kebudayaan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 Kebudayaan	RAL.01.42.01 Pengelolaan Kebudayaan	RAL.01.42.01.01 Layanan Rekomendasi izin revitalisasi dan adaptasi terhadap bangunan cagar budaya
	Pemajuan Kebudayaan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 Kebudayaan	RAL.01.42.01 Pengelolaan Kebudayaan	RAL.01.42.01.02 Layanan Rekomendasi Izin Inventarisasi terhadap bangunan struktur, dan kawasan yang diduga sebagai bangunan cagar budaya
	Pemajuan Kebudayaan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 Kebudayaan	RAL.01.42.01 Pengelolaan Kebudayaan	RAL.01.42.01.03 Layanan Izin membongkar sebagian atau melakukan Demolisi terhadap bangunan cagar budaya
	Pemajuan Kebudayaan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 Kebudayaan	RAL.01.42.02 Pembinaan Kesenian	RAL.01.42.02.01 Layanan Rekomendasi Izin Pentas
	Pengembangan Destinasi Wisata	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 Kebudayaan	RAL.01.42.03 Pembinaan Sejarah Lokal	RAL.01.42.03.01 Layanan Rekomendasi izin pemanfaatan bangunan cagar budaya
	Pengembangan Destinasi Wisata	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 Kebudayaan	RAL.01.42.04 Penetapan, Pengelolaan Cagar Budaya	RAL.01.42.04.01 Layanan Izin membongkar atau melakukan Demolisi terhadap Bangunan cagar budaya
	Pengembangan Destinasi Wisata	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 Kebudayaan	RAL.01.42.04 Penetapan, Pengelolaan Cagar Budaya	RAL.01.42.04.02 Layanan Rekomendasi izin pemugaran bangunan pada lahan bangunan cagar budaya
	Pengembangan Destinasi Wisata	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 Kebudayaan	RAL.01.42.05 Pengelolaan Permuseuman	RAL.01.42.05.01 Layanan Rekomendasi Izin Inventarisasi terhadap bangunan struktur, dan kawasan yang diduga sebagai bangunan cagar budaya
	Kualitas Infrastruktur	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL.01.17.01 Kualitas Jalan Kabupaten	RAL.01.17.01.01 Penyelenggaraan Jalan
	Kualitas Infrastruktur	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL.01.17.01 Kualitas Jalan Kabupaten	RAL.01.17.01.02 Pengujian Bahan Konstruksi
	Kualitas Infrastruktur	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL.01.17.01 Kualitas Jalan Kabupaten	RAL.01.17.01.03 Penyediaan Alat Berat
BNPB, BPBD Propinsi Dan Basarnas	Ketahanan Daerah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 Keamanan	RAL.01.29.01 Penanggulangan Bencana	RAL.01.29.01.01 Penanggulangan Bencana
Kementerian Pertanian / Badan Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan Daerah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 Pertanian	RAL.01.07.05 Pengawasan PSAT	RAL.01.07.05.01 Layanan Pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kualitas Lingkungan Hidup	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL.01.40.01 Pengendalian Lingkungan Hidup	RAL.01.40.01.01 Pemeriksaan/Penilaian dan rekomendasi Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL-UPL, SPPLH) dan Persetujuan Lingkungan Hidup
Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kualitas Lingkungan Hidup	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL.01.40.01 Pengendalian Lingkungan Hidup	RAL.01.40.01.02 Rekomendasi Persetujuan Teknis dan SLO Pembuangan Air Limbah dan Pengendalian Udara Emisi
Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kualitas Lingkungan Hidup	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL.01.40.01 Pengendalian Lingkungan Hidup	RAL.01.40.01.03 Rekomendasi Rincian Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Penyimpanan sementara dan pengumpulan skala Kabupaten)
Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kualitas Lingkungan Hidup	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL.01.40.02 Pengawasan Lingkungan Hidup	RAL.01.40.02.01 Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Persetujuan Lingkungan
Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kualitas Lingkungan Hidup	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL.01.40.02 Pengawasan Lingkungan Hidup	RAL.01.40.02.02 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
SKPM	Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 Investasi	RAL.01.12.02 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal	RAL.01.12.02.01 Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang
SKPM		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 Investasi	RAL.01.12.03 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	RAL.01.12.03.01 Promosi Penanaman Modal
Departemen Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Kompetensi Masyarakat	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL.01.32.01 Pelatihan Tenaga Kerja	RAL.01.32.01.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Departemen Ketenagakerjaan Republik Indonesia; Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Kompetensi Masyarakat	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL.01.32.01 Pelatihan Tenaga Kerja	RAL.01.32.01.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Departemen Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Kompetensi Masyarakat	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL.01.32.01 Pelatihan Tenaga Kerja	RAL.01.32.01.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Departemen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kompetensi Masyarakat	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.18 Transmigrasi	RAL.01.18.01 Pelatihan Transmigran	RAL.01.18.01.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Departemen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kompetensi Masyarakat	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.18 Transmigrasi	RAL.01.18.01 Pelatihan Transmigran	RAL.01.18.01.02 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
Departemen Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Produktivitas Masyarakat	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL.01.32.02 Penyaluran Tenaga Kerja	RAL.01.32.02.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota
Departemen Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Produktivitas Masyarakat	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL.01.32.02 Penyaluran Tenaga Kerja	RAL.01.32.02.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota
Departemen Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Produktivitas Masyarakat	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL.01.32.02 Penyaluran Tenaga Kerja	RAL.01.32.02.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota
Departemen Koperasi UKM	Produktivitas Masyarakat	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 Koperasi	RAL.01.13.02 Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	RAL.01.13.02.01 Penerbitan Perpanjangan Izin Mempergunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Departemen Koperasi UKM	Produktivitas Masyarakat	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 Koperasi	RAL.01.13.03 Pendidikan Perkoperasian	RAL.01.13.03.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Departemen Koperasi UKM	Produktivitas Masyarakat	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 Koperasi	RAL.01.13.04 Pemberdayaan dan perlindungan koperasi di daerah	RAL.01.13.04.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Departemen Koperasi UKM	Produktivitas Masyarakat	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 Usaha Kecil Dan Menengah	RAL.01.13.05 Pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan	RAL.01.13.05.01 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
Departemen Koperasi UKM	Produktivitas Masyarakat	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 Usaha Kecil Dan Menengah	RAL.01.13.06 Pengembangan UMKM	RAL.01.13.06.01 Pengembangan UMKM
SKN dan Sekretariat Negara	Kualitas Pelayanan Publik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	RAL.02.04.01.01 Layanan Pensiun Pegawai

BKN, BKD Propinsi Jabar	Kualitas Pelayanan Publik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.02 Mutasi dan Promosi ASN	RAL.02.04.02.01 Layanan Perpindahan Pegawai (Mutasi)
BKN, BKD Propinsi Jabar	Kualitas Pelayanan Publik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.02 Mutasi dan Promosi ASN	RAL.02.04.02.02 Layanan Kenaikan Pangkat
BKN, BKD Propinsi Jabar, MENPAN RB, Intansi Pembina Jabatan Fungsional	Kualitas Pelayanan Publik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.02 Mutasi dan Promosi ASN	RAL.02.04.02.03 Layanan Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional
Badan Pembinaan Penasehatan Perselisihan Perkawinan (BP4)	Kualitas Pelayanan Publik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.03 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	RAL.02.04.03.01 Layanan Ijin Perceraian
	Kualitas Pelayanan Publik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.03 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	RAL.02.04.03.02 Layanan Cuti Besar
BKN	Kualitas Pelayanan Publik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.03 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	RAL.02.04.03.03 Layanan Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)
BKPM	Kualitas Pelayanan Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL.01.12.01 Perizinan Penanaman Modal	RAL.01.12.01.04 Pelayanan Penanaman Modal
BKPM	Kualitas Pelayanan Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL.01.12.01 Perizinan Penanaman Modal	RAL.01.12.01.02 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
BKPM	Kualitas Pelayanan Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL.01.12.01 Perizinan Penanaman Modal	RAL.01.12.01.03 Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Kementerian Kominfo dan Diskominfo Prov Jabar	Kualitas Pelayanan Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.01 Pengelolaan Sistem Informasi	RAL.01.43.01.01 Layanan Media Sosial
Kementerian Kominfo dan Diskominfo Prov Jabar	Kualitas Pelayanan Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.01 Pengelolaan Sistem Informasi	RAL.01.43.01.02 Layanan Web sumedangkab.go.id
Kementerian Kominfo dan Diskominfo Prov Jabar	Kualitas Pelayanan Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.01 Pengelolaan Sistem Informasi	RAL.01.43.01.03 Layanan Melalui Youtube
Forum KIM Jabar, Diskominfo Prov Jabar	Kualitas Pelayanan Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.01 Pengelolaan Sistem Informasi	RAL.01.43.01.04 Layanan Mitra Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Kementerian Kominfo dan Diskominfo Prov Jabar	Kualitas Pelayanan Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.01 Pengelolaan Sistem Informasi	RAL.01.43.01.05 Layanan Kerjasama melalui Media Massa
Dinas Perijinan, DPMPSTP, Kementerian Kominfo, Kementerian Investasi/BKPM	Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.02 Pengelolaan Data dan Informasi	RAL.01.43.02.01 Layanan Tower
Komis Informasi KEMKOMINFO	Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.02 Pengelolaan Data dan Informasi	RAL.01.43.02.02 Layanan PPID
KEMENPAN RB	Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.02 Pengelolaan Data dan Informasi	RAL.01.43.02.03 Layanan SP4N Laporan
BSRE BSSN	Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL.02.09.03 Keamanan SPBE	RAL.02.09.03.01 Layanan Tanda Tangan Elektronik
Semua SKPD selaku Produsen Data, BAPPPEDA selaku Koordinator Forum, BPS selaku Pembina Data, Diskominfo Jabar selaku Pengguna Data, BAPENAS	Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.02 Pengelolaan Data dan Informasi	RAL.01.43.02.04 Layanan Open Data Sumedang
BAPPENAS	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAL.02.03.01 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RAL.02.03.01.01 Layanan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
BAPPENAS, BRIN	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAL.02.03.01 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RAL.02.03.01.01 Layanan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
BAPPENAS	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAL.02.03.01 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RAL.02.03.01.01 Layanan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Kemenkeu	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL.02.02.01 Pengelolaan Keuangan	RAL.02.02.01.01 Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.2a.4. Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA)

A. Pemahaman RAA

RAA adalah kerangka kerja untuk mengkategorikan aplikasi untuk membantu dalam identifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi dari aplikasi. Definisi dari aplikasi itu sendiri, adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan pemerintah (Perpres SPBE, Pasal 1 angka 21).

Tujuan dari disusunnya RAA adalah menjadi acuan dalam mengklasifikasikan aplikasi dan komponennya. Dengan demikian pemetaan domain arsitektur aplikasi dapat disusun baik untuk kondisi saat ini maupun perencanaan pengembangannya. Berdasarkan informasi yang dihasilkan dari proses pemetaan tersebut, akan membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi ataupun redundansi, peluang untuk berbagi pakai, ataupun untuk penggunaan kembali.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan RAA antara lain:

- 1) Taksonomi RAA disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan/atau pengintegrasian fungsi lain/baru dalam penyediaan kemampuan TIK;
- 2) Aplikasi yang berorientasi pada layanan;
- 3) Didefinisikan sebagai hirarki komponen aplikasi;
- 4) Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- 5) Berbasis standar terbuka (*open source*);
- 6) Terkorelasi dengan RAL, dan RAD melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung RAK.

RAA berlaku secara nasional, sehingga IPPD akan menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan aplikasi yang digunakan. Dengan demikian dapat dilakukan efisiensi. Pemetaan domain aplikasi SPBE yang menggunakan RAA akan dapat memantau dan mengevaluasi pemerataan infrastruktur TIK nasional.

B. Struktur RAA

Struktur dari RAA SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi SPBE ke dalam 2 (dua) domain aplikasi sebagai RAA tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Area aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi SPBE ke dalam area aplikasi sesuai dengan Struktur dari RAA SPBE Nasional ditambah 2 (dua) tingkat, yaitu:
 - a. Kategori aplikasi, yang merupakan pengelompokan dari penjabaran RAL di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai tingkat 3 (tiga).
 - b. Sub Kategori aplikasi, yang merupakan pengelompokan dari penjabaran RAA tingkat 3 di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai tingkat 4 (empat) masing-masing domain aplikasinya sebagai RAA tingkat 2 (kedua).

C. Taksonomi RAA

RAA terdiri dari 4 (dua) domain aplikasi, yaitu: Domain aplikasi di tingkat 1, Area Aplikasi di tingkat 2, Kategori Aplikasi di tingkat3 (tiga) dan Sub Kategori Layanan untuk tingkat 4 (empat). RAA menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur aplikasi baik secara nasional maupun untuk IPPD dan menjadi dasar kebutuhan penyediaan infrastruktur TIK yang selanjutnya didefinisikan pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI).

Tabel 4.5
Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA)

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran
DAA1	e-office	Aplikasi Single Sign On untuk ASN Kab. Sumedang	Multifungsi mulai dari: Kepegawaian, Surat-menyurat, Pekerjaan, dll	Profil pegawai, kinerja pegawai,
DAA2	e-office desa	Aplikasi Single Sign On untuk Perangkat Desa Kab. Sumedang	Multifungsi mulai dari: Kepegawaian, Surat-menyurat, Pekerjaan, dll	Profil perangkat desa, kinerja & absen
DAA3	SIPKD	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Data Keuangan Daerah
DAA4	SIPD	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Data Pembangunan Daerah
DAA5	SIMPEG	Aplikasi Kepegawaian ASN	Aplikasi Kepegawaian ASN	Data Pegawai
DAA6	E-PUSKESMAS	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Informasi	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Informasi	Data Layanan Kesehatan, Data
DAA7	SIRUP	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	Data Barang/Jasa
DAA8	ICE MANDIRI	Sistem Informasi Izin Cetak Mandiri	Sistem Informasi Izin Cetak Mandiri	Data Perizinan
DAA9	PPID	Sistem Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sistem Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Informasi/Dokumen publik
DAA10	SISKEUDES	Aplikasi Sistem Keuangan Desa	Aplikasi Sistem Keuangan Desa	Data Keuangan Desa
DAA11	SIAPDOL	Sistem Aplikasi Pajak Daerah Online	Sistem Aplikasi Pajak Daerah Online	Data Pajak
DAA12	SIPEDO	Sistem Pelatihan Berbasis Database Online	Sistem Pelatihan Berbasis Database Online	Data Perusahaan, Data Pelatihan, Data Peserta Pelatihan
DAA13	MPP	Mall Pelayanan Publik	Mall Pelayanan Publik	Data Pelayanan Publik
DAA14	MAJAH	Mari Jaga dan Cegah. Informasi Perkembangan Covid-19	Mari Jaga dan Cegah. Informasi Perkembangan Covid-19	Data Terkini Covid, Data Vaksin
DAA15	MAUNEH	Aplikasi Media Informasi BANSOS Kab. Sumedang	Aplikasi Media Informasi BANSOS Kab. Sumedang	Data Bansos
DAA16	SILASIDAKEP	Aplikasi Layanan Sistem Daring Kependudukan	Aplikasi Layanan Sistem Daring Kependudukan	Data Kependudukan (Akta, KK, KTP, dll)
DAA17	SIKEPO	Sistem Informasi Agenda Kegiatan Reporter	Sistem Informasi Agenda Kegiatan Reporter	Data Reporter, Data Agenda Kegiatan
DAA18	JDIH	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Data Produk Hukum
DAA19	SIJAGUR	Sistem Informasi Kinerja Pembangunan Terukur	Sistem Informasi Kinerja Pembangunan Terukur	Data Kinerja SKPD
DAA20	SIMEP	Sistem Informasi manajemen Evaluasi dan Pelaporan	Sistem Informasi manajemen Evaluasi dan Pelaporan	Data Pekerjaan
DAA21	SIPDOK	Sistem Informasi Realisasi Pengadaan Barang Jasa	Sistem Informasi Realisasi Pengadaan Barang Jasa	Data Barang/Jasa
DAA22	SIPEKAT	Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Terintegrasi	Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Terintegrasi	Data Keuangan
DAA23	SICERDAS	Sistem Cetak dan Unduh RPJMD dan Rencana Strategis	Sistem Cetak dan Unduh RPJMD dan Rencana Strategis	Data RPJMD

Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembang	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi (Dependency)	RAA Level 1 (Dependency)	RAA Level 2 (Dependency)
Web Based	Open Source	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	Diskominfoсандитик	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Web Based	Open Source	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	Diskominfoсандитик	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	BKAD	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	Bapppeda	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	BKPSDM	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	Dinkes	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	Diskominfoсандитик	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	DPMPTSP	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	Diskominfoсандитик	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	BKAD	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	Bapenda	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	BLK, Disnakertrans	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	Diskominfoсандитик, DPMTSP	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	Diskominfoсандитик	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	Dinsos	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	Disdukcapil	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	Diskominfoсандитик	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	Setda	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	Setda	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	Setda	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	Setda	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	BKAD	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter 3	Diskominfoсандитик	MySQL	Bapppeda	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu

4.2a.5. Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI)

A. Pemahaman RAI.

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya (Perpres SPBE, Pasal 1 angka 15).

Tujuan dari disusunnya RAI adalah untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur TIK yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam peta domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur TIK yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilisasinya.

Beberapa prinsip yang digunakan dalam penyusunan RAI adalah :

- 1) Taksonomi RAI harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru;
- 2) Didefinisikan sebagai hirarki elemen infrastruktur TIK;
- 3) Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- 4) Memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
- 5) Berbasis standar umum (*open standard*);
- 6) Dapat digunakan untuk mendukung RAA dan RAD melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh RAK.

RAI berlaku se-Kabupaten Sumedang, sehingga Perangkat Daerah menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan infrastruktur TIK yang dimiliki. Dengan demikian dapat dilakukan pemerataan infrastruktur TIK yang menjadi prioritas agenda pembangunan.

B. Struktur RAI

Struktur dari RAI SPBE Nasional pada 2 (dua) tingkat teratas, yaitu:

- 1) Domain, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain sebagai RAI tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Area, yang mengelompokkan infrastruktur SPBE ke dalam area sesuai dengan masing-masing domain infrastrukturnya sebagai RAI tingkat 2 (kedua).

Struktur dari RAI SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ditambah 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Kategori Infrastruktur; dan
- 2) Sub Kategori Infrastruktur.

C. Taksonomi RAI

RAI terdiri dari 3 (tiga) domain di tingkat 1 dan 8 (delapan) area di tingkat 2 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ditambah di tingkat 3 (tiga) dan 4 (empat).

Tabel 4.6
Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI)

ID	Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Type Device	Keperluan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	RAI Level 1 (Dependency)
DAI11	Switch 1	Switch CRS354 Diskominfo	Multilayer Switch	Sendiri	Diskominfo	Diskominfo	RAI.03 Platform
DAI21	Router 1	Router Mikrotik RB2011 SKPD, Kecamatan	Router	Sendiri	Diskominfo	Diskominfo	RAI.03 Platform
DAI22	Router 2	Router Mikrotik CCR10 Setda	Router	Sendiri	Diskominfo	Diskominfo	RAI.03 Platform
DAI23	Router 3	Router Mikrotik RB1100 Bappedada, BKPSDM	Router	Sendiri	Diskominfo	Diskominfo	RAI.03 Platform
DAI24	Router 4	Router Mikrotik RB941 UPTD	Router	Sendiri	Diskominfo	Diskominfo	RAI.03 Platform
DAI25							
DAI26							
DAI27							
DAI28							
DAI29							
DAI30							

RAI Level 2 (Dependency)	RAI Level 3 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Fasilitas Komputasi (Dependency)	Perangkat Lunak Platform (Dependency)	Perangkat Keras Server (Dependency)	Perangkat Keras Media Penyimpanan (Dependency)
RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Diskominfo	Ruang Server		Multilayer Switch	
RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Diskominfo	Ruang Server		Router	
RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Diskominfo	Ruang Server		Router	
RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Diskominfo	Ruang Server		Router	
RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Diskominfo	Ruang Server		Router	

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Keperluan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola
RAI71	Server - E-office ASN	Server untuk aplikasi e-office	Web server, mail server, aplikasi, database, file server, active directory, dan keamanan informasi.	Sendiri	Diskominfo	Diskominfo
RAI72	Server - Plesk	Server untuk menampung berbagai aplikasi	Web server, mail server, aplikasi, database, file server, active directory, dan keamanan informasi.	Sendiri	Diskominfo	Diskominfo
RAI73	Server - Development	Server untuk pembangunan & testing aplikasi	Web server, mail server, aplikasi, database, file server, active directory, dan keamanan informasi.	Sendiri	Diskominfo	Diskominfo
RAI74	Server - Siskeudes	Aplikasi untuk menampung aplikasi keuangan desa	Web server, mail server, aplikasi, database, file server, active directory, dan keamanan informasi.	Sendiri	DPMD	Diskominfo
RAI75	Server - PTSP	Aplikasi untuk pelayanan Mall Pelayanan Publik	Web server, mail server, aplikasi, database, file server, active directory, dan keamanan informasi.	Sendiri	DPMTSP	Diskominfo
RAI76	Server - Hosting SKPD	Server untuk menampung berbagai website SKPD-K30	Web server, mail server, aplikasi, database, file server, active directory, dan keamanan informasi.	Sendiri	Diskominfo	Diskominfo
RAI77	Server - SIMPEG	Server untuk mengelola data kepegawaian	Web server, mail server, aplikasi, database, file server, active directory, dan keamanan informasi.	Sendiri	BKPSDM	Diskominfo
RAI78	Server - E-Office Desa	Server untuk aplikasi e-office desa	Web server, mail server, aplikasi, database, file server, active directory, dan keamanan informasi.	Sendiri	Diskominfo	Diskominfo
RAI79	Server - SISKEUDES	Server untuk aplikasi Siskeudes	Web server, mail server, aplikasi, database, file server, active directory, dan keamanan informasi.	Sendiri	Diskominfo	Diskominfo
RAI80	Server - E-Sign Cloud	Server untuk tanda tangan elektronik	Web server, mail server, aplikasi, database, file server, active directory, dan keamanan informasi.	Sendiri	Diskominfo	Diskominfo

Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Kode Referensi Infrastruktur	Teknik Penyimpanan	RAI Level 1 (Dependency)	RAI Level 2 (Dependency)
Diskominfo	Linux	188GB	56 CPU High End	2000GB			RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data
Diskominfo	Linux	78GB	28 CPU High End	1000GB			RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data
Diskominfo	Linux	15,2GB	8 CPU High End	500GB			RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data
Diskominfo	Linux	15,7GB	16 CPU High End	500GB			RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data
Diskominfo	Linux	62,8GB	6 CPU High End	1000GB			RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data
Diskominfo	Linux	15,4GB	16 CPU High End	1000GB			RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data
Diskominfo	Linux	15,6GB	16 CPU High End	1000GB			RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data
Diskominfo	Linux	94,1GB	32 CPU High End	1000GB			RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data
Diskominfo	Linux							
Diskominfo	Linux							

RAI Level 3 → (Dependency)	Instansi → (Dependency)	Perangkat Lunak Platform → (Dependency)	Fasilitas Komputasi ← (Dependency)
RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah	Diskominfo sanditik	Linux	Ruang Server
RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah	Diskominfo sanditik	Linux	Ruang Server
RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah	Diskominfo sanditik	Linux	Ruang Server
RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah	Diskominfo sanditik	Linux	Ruang Server
RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah	Diskominfo sanditik	Linux	Ruang Server
RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah	Diskominfo sanditik	Linux	Ruang Server
RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah	Diskominfo sanditik	Linux	Ruang Server
RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah	Diskominfo sanditik	Linux	Ruang Server
	Diskominfo sanditik	Linux	Ruang Server
	Diskominfo sanditik	Linux	Ruang Server

ID	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Nama Perangkat Sistem Operasi	Nama Perangkat Sistem Utilitas	Nama Perangkat Jenis Sistem Database
RAI01	Windows	Sistem Operasi Windows	Sistem Operasi	Windows	Sistem Operasi Windows	Sistem Operasi Windows
RAI02	Linux	Sistem Operasi Windows	Sistem Operasi	Linux	Sistem Operasi Windows	Sistem Operasi Windows
RAI03	Android	Sistem Operasi Windows	Sistem Operasi	Linux	Sistem Operasi Windows	Sistem Operasi Windows
RAI04	Microsoft Office	Aplikasi Microsoft Office	Sistem Utilitas	Windows	Aplikasi Microsoft Office	Aplikasi Microsoft Office
RAI05	Google Chrome	Aplikasi Browser Google Chrome	Sistem Utilitas	Windows/Linux	Aplikasi Browser Google Chrome	Aplikasi Browser Google Chrome
RAI06	MySQL	Database MySQL	Sistem Database	Windows/Linux	Database MySQL	Database MySQL
RAI07	Oracle	Database Oracle	Sistem Database	Windows/Linux	Database Oracle	Database Oracle
RAI08						
RAI09						
RAI100						

Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi [Tanggal Berakhirnya Lisensi]	RAI Level 1 → (Dependency)	RAI Level 2 → (Dependency)	RAI Level 3 → (Dependency)
Periodik	Diskominfo sanditik		RAI.03 Platform	RAI.03.02 Perangkat Lunak	RAI.03.02.01 Sistem Operasi
Kode Sumber Terbuka	Diskominfo sanditik		RAI.03 Platform	RAI.03.02 Perangkat Lunak	RAI.03.02.01 Sistem Operasi
Kode Sumber Terbuka	Diskominfo sanditik		RAI.03 Platform	RAI.03.02 Perangkat Lunak	RAI.03.02.01 Sistem Operasi
Periodik	Diskominfo sanditik		RAI.03 Platform	RAI.03.02 Perangkat Lunak	RAI.03.02.02 Sistem Utilitas
Seumur Hidup	Diskominfo sanditik		RAI.03 Platform	RAI.03.02 Perangkat Lunak	RAI.03.02.02 Sistem Utilitas
Kode Sumber Terbuka	Diskominfo sanditik		RAI.03 Platform	RAI.03.02 Perangkat Lunak	RAI.03.02.03 Sistem Database
Periodik	Diskominfo sanditik		RAI.03 Platform	RAI.03.02 Perangkat Lunak	RAI.03.02.03 Sistem Database

ID	Nama Jaringan Intra Pemerintah	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola
DAI1	Icon+ Dedicated	PT PLN Icon+	Dedicated	BUMN	Diskominfo sanditik	Diskominfo sanditik
DAI2	Icon+ Broadband	PT PLN Icon+	Broadband Corporate	BUMN	Diskominfo sanditik	Diskominfo sanditik
DAI3	Icon+ Metronet	PT Telkom	Metro	BUMN	Diskominfo sanditik	Diskominfo sanditik
DAI4	Telkom	PT Telkom	Metro	BUMN	Diskominfo sanditik	Diskominfo sanditik

Bandwidth	RAI Level 1 → (Dependency)	RAI Level 2 → (Dependency)	RAI Level 3 → (Dependency)
150Mbps	RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.01 Jaringan Intra	RAI.02.01.03 Jaringan Intra Pemerintah Daerah
5270Mbps	RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.01 Jaringan Intra	RAI.02.01.04 Jaringan Komersial/Umum
100Mbps	RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.01 Jaringan Intra	RAI.02.01.03 Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2000Mbps	RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.01 Jaringan Intra	RAI.02.01.04 Jaringan Komersial/Umum

4.2a.6. Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK)

A. Pemahaman RAK

RAK pada SPBE disusun dengan maksud sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi IPPD.

Kerangka dasar ini menjadi panduan dalam pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE nasional dan juga menjadi acuan bagi IPPD, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pengujian kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif. Secara tidak langsung, RAK akan turut mengawal pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan pada umumnya akan turut melancarkan pelaksanaan pemerataan infrastruktur TIK.

B. Struktur RAK

Struktur dari RAK SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan uji kelaikan keamanan, sebagai RAK tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur SPBE sebagai RAK tingkat 2 (kedua).

C. Taksonomi RAK

RAK terdiri dari 3 (tiga) domain keamanan di tingkat 1 dan 9 (sembilan) area keamanan di tingkat 2. RAK menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur keamanan SPBE baik secara nasional maupun untuk IPPD.

Tabel 4.7

Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK)

Nama Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Hasil Audit Keamanan SPBE	Jenis Audit Keamanan	Tanggal Kegiatan Audit Keamanan	Tindak lanjut Audit Keamanan	→ Aplikasi (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)
Penilaian Indeks KAMI	c. perlu peningkatan	Internal	November 2021	b. sebagian ditindaklanjuti		
Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	→ Aplikasi (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)		
Monitoring dan evaluasi keamanan informasi	Output kegiatan ini adalah digunakannya TTE. Kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Keamanan Informasi dan Persandian dan ditujukan untuk pemegang sertifikat elektronik dan operator aplikasi di desa-desa dan kecamatan se-kabupaten Sumedang	Februari s/d Agustus 2022				
Pelatihan dalam Rangka Edukasi tentang digital Safety (UMKM)	Output kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan SDM yang mempunyai UMKM dalam hal keamanan Digital	Agustus 2022				
Kursus singkat/Pelatihan dalam rangka standarisasi Aplikasi di operator di OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa	Output kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan SDM yang mengelola Aplikasi di OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa khususnya dalam hal keamanan data dan informasi	Maret s/d Desember 2022				
Nama Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	→ Aplikasi (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)		
Monitoring dan evaluasi keamanan informasi	Output kegiatan ini adalah teridentifikasinya kerentanan keamanan, misalnya diketahuinya pasphrase kepala SKPD atau kepala Desa oleh operator.	Februari s/d Agustus 2022				
Penilaian Indeks KAMI	Output kegiatan ini adalah diketahuinya kerentanan keamanan melalui hasil dari penilaian Indeks KAMI	Desember 2022				

Nama Kegiatan Kelainan Keamanan SPBE	Tanggal Kelainan Keamanan SPBE	→ Aplikasi (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)
Melakukan Penetration Testing terhadap Aplikasi Umum	Januari - Oktober 2022		
Kelaikan Keamanan Jaringan Intra Pemerintah	3 Januari 2022		

Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Nilai Kematangan Penangan Insiden Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	→ Aplikasi (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)
Melalui Aplikasi SILPaKAMI	Output kegiatan ini adalah Perangkat Daerah dapat melaporkan melalui aplikasi SILPaKAMI jika terjadi insiden Keamanan Informasi		3 Januari 2022		

Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	→ Aplikasi (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)
Kursus singkat/Pelatihan dalam rangka standarisasi Aplikasi operator di OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa	Output kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan SDM yang mengelola Aplikasi di OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa khususnya dalam hal keamanan aplikasi	Maret s/d Desember 2022		
Belanja Lisensi Software Antivirus	Output kegiatan ini adalah untuk peningkatan keamanan disetiap perangkat komputer atau laptop	Agustus 2022		
Belanja Lisensi Software Pentest	Output kegiatan ini adalah pembelian lisensi untuk keperluan kegiatan pentest	7 Januari 2022		

Name	Tanggal Mulai Penerapan	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Aplikasi (Dependency)
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021	30 September 2021		
ISO/IEC 27001:2013	Nopember 2021		
Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022	22 Februari 2022		

6.2 Peta Jalan SPBE Kabupaten Sumedang 2021-2025

Tabel 6.2
Peta Jalan SPBE Kabupaten Sumedang 2021-2025

No	Project/ Activities		UIC	Baseline					
				2020	2022	2023	2024	2025	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS :									
Layanan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik dan Layanan Publik Secara Elektronik yang Terintegrasi									
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD : (Inisiatif Strategis)									
1.	Tata Kelola								
	a.	Review kebijakan SPBE Existing							
		1)	Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo sanditik, Bagian Hukum	-	√			
		2)	Peraturan Bupati Sumedang 50 Tahun 2021 tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Bappppeda, Bagian Hukum	√	√			
		3)	Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik	Bagian Organisasi Setda, Bagian Hukum	√		√		
	b.	Pembahasan baru							
		1)	Peta Jalan SPBE	Bappppeda, Diskominfo sanditik, Bagian Hukum	√	√	√	√	√
		2)	Audit TIK	Diskominfo sanditik, Bagian Hukum	-	√		√	
		3)	Satu Data Indonesia Kabupaten Sumedang	Diskominfo sanditik, Bagian Hukum	-	√	√	√	√
	c.	Arsitektur SPBE : Arsitektur Proses Bisnis							
		1)	Perencanaan, Pengembangan konsep dan Sosialisasi	Diskominfo sanditik	-	√			
		2)	Reviu pengelompokan dan penggabungan proses bisnis	Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
		3)	Penyesuaian proses bisnis dengan layanan dan aplikasi	Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√

No	Project/ Activities		UIC	Baseline				
				2020	2022	2023	2024	2025
d.	Arsitektur SPBE : Arsitektur Aplikasi							
	1)	Perencanaan, Pengembangan konsep dan Sosialisasi	Diskominfosanditik	-	√	√	√	√
	2)	Pelaksanaan Portofolio <i>application assessment</i> sekaligus penyusunan rencana pemeliharaan, pengembangan dan evaluasi secara periodik (6 bulan sekali)	Diskominfosanditik	-	√	√	√	√
e.	Arsitektur SPBE : Arsitektur Data dan Informasi							
	Pembangunan, sosialisasi, dan evaluasi terus menerus Arsitektur Data dan Informasi			-	√	√	√	√
f.	Arsitektur SPBE: Arsitektur Infrastruktur							
	1)	Evaluasi jaringan eksisting	Diskominfosanditik	-	√	√	√	√
	2)	Implementasi <i>Cloud Native Design</i>	Diskominfosanditik	-		√		
	3)	Integrasi dengan sistem lain	Diskominfosanditik	-	√	√	√	√
g.	Arsitektur SPBE : Arsitektur Layanan							
	1)	Perencanaan, Pengembangan konsep dan Sosialisasi	Diskominfosanditik	-	√	√	√	√
	2)	Pengembangan Layanan terpadu yang terkait	Diskominfosanditik	-	√	√	√	√
h.	Arsitektur SPBE : Arsitektur Keamanan							
	1)	Perencanaan, Pengembangan konsep dan Sosialisasi	Diskominfosanditik	-	√	√	√	√
	2)	Pengembangan <i>security</i> yang sesuai dengan pengembangan infrastruktur SPBE	Diskominfosanditik	-	√	√	√	√
i.	<i>Roadmap</i>							
	1)	Perencanaan, Pengembangan konsep dan Sosialisasi <i>Roadmap</i> SPBE	Bappppeda, Diskominfosanditik	√	√	√	√	√
	2)	Reviu dan Evaluasi Pelaksanaan <i>Roadmap</i> SPBE	Bappppeda, Diskominfosanditik	√	√	√	√	√
j.	Rencana dan Anggaran							
	1)	Konsolidasi dan orkestrasi anggaran melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Bappppeda, BPKAD	√	√	√	√	√
	2)	Pencarian sumber pendanaan lain dari pihak ketiga (misalnya: CSR, Hibah, dll.)	Bappppeda, BPKAD	√	√	√	√	√
k.	Inovasi Proses Bisnis							

No	Project/Activities		UIC	Baseline				
				2020	2022	2023	2024	2025
	1)	Integrasi proses bisnis seluruh SKPD untuk proses bisnis yang seamless	DPMPTSP, DiskominfoSanditik	√	√	√	√	√
	2)	Pengembangan <i>open innovation system</i> dengan kolaborasi bersama komunitas dan perguruan tinggi	Bappppeda, Bagian Organisasi Setda	-	√	√	√	√
2.	Manajemen							
	a.	Manajemen Risiko						
	1)	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE.	DiskominfoSanditik	-	√	√	√	√
	2)	Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Manajemen Risiko yang termuat dalam Renstra/RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	DiskominfoSanditik	-	√	√	√	√
	3)	Penerapan manajemen risiko melalui komunikasi dan konsultasi melalui rapat berkala, rapat insidental, FGD	DiskominfoSanditik	-	√	√	√	√
	4)	Penetapan konteks risiko SPBE	DiskominfoSanditik	-	√	√	√	√
	5)	Penyusunan identifikasi manajemen risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak	DiskominfoSanditik	-	√	√	√	√
	6)	Penyusunan identifikasi manajemen risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan serta level risiko SPBE	DiskominfoSanditik	-	√	√	√	√
	7)	Penyusunan evaluasi Risiko SPBE	DiskominfoSanditik	-	√	√	√	√
	8)	Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, <i>output</i> , jadwal implentasi, dan penanggungjawabnya	DiskominfoSanditik	-	√	√	√	√
	9)	Penyusunan laporan manajemen risiko SPBE secara periodik dan insidental	DiskominfoSanditik	-	√	√	√	√
	10)	Penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE	DiskominfoSanditik	-	√	√	√	√
	11)	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	DiskominfoSanditik	-	√	√	√	√

No	Project/Activities		UIC	Baseline				
				2020	2022	2023	2024	2025
	b.	Manajemen Keamanan Informasi						
		1) Melaksanakan pengembangan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Kabupaten Sumedang Tahap-1	Diskominfo sanditik	√	√			
		2) Melaksanakan pengembangan SMKI di Kabupaten Sumedang-Tahap 2	Diskominfo sanditik	-		√		√
		3) Penyusunan dokumen pedoman keamanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
		4) Pelaksanaan program kerja SPBE : menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
		5) Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
		6) Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan supervisi kemandirian SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
	c.	Manajemen Data						
		1) Menetapkan program kerja (rencana kerja) yang terarah terkait implementasi manajemen data, mempersiapkan pedoman internal di setiap unit yang diturunkan dari PERMENPAN 16 Tahun 2020, dan mempersiapkan <i>output</i> yang sesuai dengan pedoman manajemen data.	Bappppeda dan Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
		2) Mendokumentasikan seluruh proses rapat/kegiatan manajemen data (metadata), seperti: notulensi rapat, melakukan pemutakhiran pedoman manajemen data secara periodik yang dibuktikan dengan evidence notulensi rapat, dan mempersiapkan sistem pelaporan evaluasi manajemen data secara berkala.	Bappppeda dan Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
		3) Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Data pada IPPD	Bappppeda dan Diskominfo sanditik	-	√			
		4) Penyusunan Arsitektur Data Tingkat Daerah Kabupaten Sumedang	Bappppeda dan Diskominfo sanditik	-	√			
		5) Perencanaan data induk dan referensi	Bappppeda dan Diskominfo sanditik	-	√			

No	Project/ Activities		UIC	Baseline				
				2020	2022	2023	2024	2025
	6)	Pengumpulan data induk oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappppeda dan Diskominfo sanditik	-	√			
	7)	Pemeriksaan data induk dan referensi	Bappppeda dan Diskominfo sanditik	-	√			
	8)	Penyebarluasan data induk dan referensi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappppeda dan Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
	9)	Pembaruan Data Induk dan Data Referensi	Bappppeda dan Diskominfo sanditik	-		√	√	√
	10)	Penyimpanan data pada Pusat Data Nasional	Bappppeda dan Diskominfo sanditik	-		√	√	√
	11)	Perencanaan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data	Bappppeda dan Diskominfo sanditik	-		√	√	√
	d.	Manajemen Aset TIK						
	1)	Membuat pedoman manajemen aset TIK yang mencakup; membuat Flowchart Bisnis proses Manajemen Aset TI K dan membuat format untuk laporan evaluasi aset TIK.	BKAD, Diskominfo sanditik	-	√			
	2)	Menginventarisasi aset SPBE (data, informasi, aplikasi dan infrastruktur) Pemerintah Kabupaten Sumedang	BKAD, Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
	3)	Penyusunan dokumen perencanaan Aset TIK Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang	BKAD, Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
	4)	Penyusunan laporan pengadaan Aset TIK Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang	BKAD	-	√	√	√	√
	5)	Penyusunan atas penghapusan Aset TIK Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang	BKAD	-	√	√	√	√
	e.	Manajemen SDM						
	1)	Pembuatan direktori kompetensi untuk mendukung Digital Literacy (programmer/DevOps, IT Project Management, IoT, AI, Data Scientist, Data Analyst, IT Security, ICT Audit) beserta profiling/ peta kebutuhan kompetensi sebelum melakukan pemenuhan kompetensi dan HR planning	BKPSDM	-		√	√	√
	2)	Penyusunan tahapan/proses pemenuhan kompetensi serta indikator penilaian kompetensi yang dilakukan oleh BKPSDM, beserta evidence evaluasi kompetensi yang dilakukan secara periodik.	BKPSDM	-		√	√	√

No	Project/Activities		UIC	Baseline				
				2020	2022	2023	2024	2025
	3)	Peningkatan kompetensi pegawai (training and development) yang sesuai dengan data TNA atau hasil dari penilaian evaluasi kinerja ASN oleh BKN dan BKPSDM	BKPSDM	√	√	√	√	√
	4)	Melaksanakan evaluasi kinerja pegawai dan evaluasi kompetensi SDM TIK secara periodik (talent pool-nine boxes secara lebih komprehensif) dengan mengacu pada digital literacy yang diharapkan (digital ethics, digital safety, digital culture)	BKPSDM	√	√	√	√	√
	5)	Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE : Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap jabatan TIK	BKPSDM	√	√	√	√	√
	6)	Peta Jabatan Pemerintah Kabupaten Sumedang	BKPSDM	√	√	√	√	√
	7)	Rencana atau laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan TIK Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang	BKPSDM	√	√	√	√	√
	8)	Analisis kebutuhan pelatihan bagi pejabat TIK di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang	BKPSDM	√	√	√	√	√
	f.	Manajemen Pengetahuan						
	1)	Mengembangkan aplikasi (portal) manajemen pengetahuan sesuai dengan proses manajemen perubahan	BKPSDM dan Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
	2)	Mengintegrasikan sistem ini dengan aplikasi sejenis	BKPSDM dan Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
	3)	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Pengetahuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang	BKPSDM dan Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
	4)	Penyusunan dokumen perencanaan Manajemen Pengetahuan SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori Risiko SPBE dan target realisasinya	BKPSDM dan Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
	5)	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan/pemanfaatan dan alih pengetahuan	Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
	g.	Manajemen Perubahan						
	1)	Menyusun SOP Manajemen Perubahan SPBE	Bagian Organisasi Setda, Diskominfo sanditik, BKPSDM	-	√	√	√	√

No	Project/Activities		UIC	Baseline				
				2020	2022	2023	2024	2025
	2)	Menyiapkan dokumen rencana perubahan	Bappppeda	-	√	√	√	√
	3)	Penyusunan Log Manajemen perubahan pada unit kerja Pusat Data dan Informasi	Bagian Organisasi dan Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
	4)	Melaksanakan Manaejemen Perubahan SPBE	Bag Organisasi dan Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
	h.	Manajemen Layanan SPBE						
	1)	Menginisiasi, merencanakan, sosialisasi dan implementasi mengenai Whistleblowing System kepada ASN dan juga masyarakat.	Inspektorat Daerah dan Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
	2)	Evaluasi layanan dengan SLA yang sudah jadi untuk setiap aplikasi, sehingga ada beberapa layanan publik menjadi microservice untuk memudahkan proses integrasi	Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
	3)	Penyediaan paltform layanan perijinan online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPPTSP dan Diskominfo sanditik	√	√	√	√	√
	4)	Penyediaan platform layanan kepegawaian online Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM dan Diskominfo sanditik	√	√	√	√	√
	5)	Penyediaan platform pengaduan dan pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD dan Diskominfo sanditik	√	√	√	√	√
	6)	Pengelolaan platform pelayanan dan pengaduan online	Diskominfo sanditik	√	√	√	√	√
3.	Layanan							
	a.	Layanan Administrasi Pemerintahan						
	1)	Standarisasi dan sosialisasi layanan: pembuatan SLA, pembuatan FAQ, standar penyelesaian masalah (misal 3x24 jam)	Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
	2)	Implementasi layanan ke seluruh SKPD (sampai level Desa) dengan memanfaatkan teknologi AI, IoT, dan Big Data untuk meningkatkan kinerja aplikasi	Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
	3)	Evaluasi dan Perbaiki Layanan Administrasi Pemerintahan	Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
	b.	Layanan Publik						
	1)	Standarisasi aplikasi: pembuatan SLA, pembuatan FAQ, standar penyelesaian masalah (misal 3x24 jam)	Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√

No	Project/Activities		UIC	Baseline				
				2020	2022	2023	2024	2025
	2)	Implementasi layanan ke seluruh SKPD (sampai level Desa) dengan memanfaatkan teknologi AI, IoT, dan Big Data untuk meningkatkan kinerja aplikasi	Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
	3)	Evaluasi dan Perbaikan Layanan Administrasi Pemerintahan	Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
4.	Infrastruktur							
	a.	JIP						
	1)	Perencanaan kebutuhan kapasitas dan sebaran jaringan intranet dan extranet	Diskominfo sanditik	√	√	√	√	√
	2)	Perluasan jaringan yang terhubung dengan fasilitas pengamanan firewall	Diskominfo sanditik	√	√	√	√	√
	3)	Persiapan dan pembangunan fasilitas NOC yang terpadu	Diskominfo sanditik	-	-	√	-	-
	b.	Jaringan Penghubung Layanan						
		Integrasi horisontal dari semua layanan yang ada dan integrasi vertikal dari e-office dengan layanan di provinsi dan di pusat (nasional), terutama yang menggunakan aplikasi berbagi pakai	Diskominfo sanditik	√	√	√	√	√
	c.	Pusat Data						
	1)	Sesuai dengan arsitektur data dan arsitektur layanan, maka pusat layanan data (dan organisasinya yang dedicated) dibangun dengan cloud native design sebagai inti pengembangannya	Diskominfo sanditik	√	√	√	√	√
	2)	Pelaksanaan lanjutan cloud native design dan microservice	Diskominfo sanditik		√			√
5.	Aplikasi							
	a.	E-Office Kabupaten						
		Integrasi sistem layanan e-office: e-planning dengan e-budgeting, e-money, e-database, e-procurement, e-keuangan, e-musrenbang, e-RPJMD, e-Office desa, dll secara bertahap	Diskominfo sanditik	√	√	√	√	√
	b.	E-Office Desa						
		Implementasi aplikasi di semua desa yang mencakup: Administrasi Pemerintahan Desa (kinerja); Layanan Publik (Chatbot); e-sakip desa (penurunan kemiskinan dan stunting, standar kepuasan masyarakat); desa cantik/desa simpatik (Satu Data Indonesia)	Diskominfo sanditik	√	√	√	√	√

No	Project/ Activities		UIC	Baseline				
				2020	2022	2023	2024	2025
	C	Tahu Sumedang						
		1) Membangun layanan publik yang terintegrasi (tahu.sumedangkab.go.id)	Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
		2) Kolaborasi dengan masyarakat (komunitas dan bisnis) untuk pengembangan aplikasi baru	Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
6.	Audit SPBE							
	a.	Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, Audit Keamanan SPBE						
		1) Membuat rujukan formal/ pedoman pelaksanaan Audit SPBE (Infrastruktur, aplikasi, keamanan TIK).	Inspektorat Daerah, Diskominfo sanditik	-	√	√	√	√
		2) Membuat rencana kerja terkait kegiatan audit infrastruktur, organisasi, aplikasi, dan keamanan TIK.	Inspektorat Daerah, Diskominfo sanditik	-	√	-	√	-
		3) Menyiapkan SDM dengan sertifikasi yang tepat untuk melakukan audit SPBE secara internal.	BKPSDM	-	√	-	√	-
		4) Melaksanakan kegiatan audit SPBE baik secara internal dan eksternal secara teratur dan berkala.	Inspektorat Daerah, Diskominfo sanditik	-	√	-	√	-
		5) Melaksanakan tindak lanjut hasil audit secara konsisten dan berkesinambungan	Inspektorat Daerah , Diskominfo sanditik, Perangkat Daerah Berkenaan	-	-	√	-	√
7.	Audit TIK							
	Audit TIK dengan menggunakan ISO 27001 dan/atau indeks KAMI							
		1) Memperkuat organisasi pelaksana Audit TIK	Sekretariat Daerah	-	√	-	√	-
		2) Membuat rujukan formal/ pedoman pelaksanaan Audit TIK sesuai dengan ISO 27001 dan atau Indeks KAMI	Inspektorat Daerah, Diskominfo sanditik	-	√	-	√	-
		3) Membuat rencana kerja terkait kegiatan audit TIK.	Inspektorat Daerah, Diskominfo sanditik	-	√	-	√	-
		4) Melaksanakan kegiatan audit TIK baik secara internal dan eksternal secara teratur dan berkala.	Inspektorat Daerah, Diskominfo sanditik	-	√	-	√	-


No	Project/ Activities	UIC	Baseline				
			2020	2022	2023	2024	2025
5)	Melaksanakan tindak lanjut hasil audit TIK secara konsisten dan berkesinambungan	Inspektorat Daerah, DiskominfoSanditik, Perangkat Daerah Berkenaan	-	-	√		√

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022